

**ANALISIS PERBANDINGAN KEMAMPUAN KEUANGAN
DAERAH DAN PEMANFAATAN POTENSI DAERAH
SEBAGAI SEKTOR UNGGULAN
SELAMA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
(Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh :
Dyah Permana Erawaty
NIM : 022114043

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2006

Skripsi

**ANALISIS PERBANDINGAN KEMAMPUAN KEUANGAN
DAERAH DAN PEMANFAATAN POTENSI DAERAH
SEBAGAI SEKTOR UNGGULAN
SELAMA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN
KOTA PEKALONGAN**

Oleh :

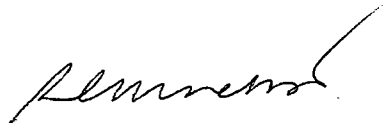
Dyah Permana Erawaty

022114043

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I

Tanggal : 14 Juni 2006



Fr. Reni Retno A., S.E., M.Si., Akt.

Pembimbing II

Tanggal : 2 Agustus 2006



M. T. Ernawati, S.E., M.A.

Skripsi

**ANALISIS PERBANDINGAN KEMAMPUAN KEUANGAN
DAERAH DAN PEMANFAATAN POTENSI DAERAH
SEBAGAI SEKTOR UNGGULAN
SELAMA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
(Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Pekalongan)**

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Dyah Permana Erawaty

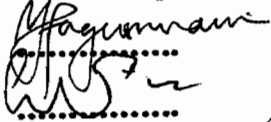
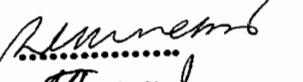



NIM : 022114043

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji

Pada tanggal 16 Agustus 2006

dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

	Nama Lengkap	Tanda tangan
Ketua	Dra. YFM. Gien Agustinawansari M.M., Akt.	
Sekretaris	Lisia Aprisai S.E., M.Si., Akt.	
Anggota	Fit. Reni Retno A., S.E., M.Si., Akt.	
Anggota	Maria Theresia Ernawati, S.E., M.A.	
Anggota	Firma Sulistyowati, S.E., M.Si.	

Yogyakarta, 31 Agustus 2006

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma




Alex Kahu Lantum, M.S.

**Everything happened in your life,
BELIEVE
that GOD always gives THE BEST for you.**

*Hey, Never Give Up !!
I Know You Can Do It.
Trust Yourself because I'm Trusting you.*

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- **Tuhan Yesus Kristus Juruslamatku, Bapa dan Sahabatku**
- **Yang tersayang Papa dan Mama**
 - **Meine Liebste, Yudha**
 - **Adikku Yayan dan Yogi**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 2 Agustus 2006

Penulis,

A handwritten signature in black ink, enclosed in a hand-drawn oval. The signature is stylized and appears to read 'Dyah Permana Erawaty'.

Dyah Permana Erawaty

ABSTRAK
ANALISIS PERBANDINGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
DAN PEMANFAATAN POTENSI DAERAH
SEBAGAI SEKTOR UNGGULAN
SELAMA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN
DAN KOTA PEKALONGAN

Dyah Permana Erawaty
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta 2006

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kemampuan keuangan daerah; dan untuk mengetahui potensi daerah yang telah menjadi sektor unggulan selama pelaksanaan otonomi daerah.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Pekalongan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan perbandingan antara PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap TPD (Total Penerimaan Daerah), perbandingan BHP (Bagi Hasil Pajak) terhadap TPD, perbandingan SB (Sumbangan Bantuan) terhadap TPD, analisis trend, analisis LQ (*Location Quotient*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DOFD (Derajat Otonomi Fiskal Daerah) Kabupaten Pekalongan dari rasio PAD terhadap TPD dan dari rasio BHP terhadap TPD berfluktuasi, sedangkan dari rasio SB terhadap TPD menurun. DOFD Kota Pekalongan dari rasio PAD terhadap TPD semakin meningkat, dari rasio BHP terhadap TPD berfluktuasi dan dari rasio SB terhadap TPD cenderung meningkat. Potensi daerah Kabupaten Pekalongan sudah menjadi sektor unggulan. Potensi daerah Kota Pekalongan belum menjadi sektor unggulan.

ABSTRACT

**COMPARISON ANALYSIS OF REGIONAL FINANCIAL CAPABILITY
AND REGIONAL POTENTIAL UTILIZATION AS SUPREME SECTOR
DURING REGIONAL AUTONOMY IMPLEMENTATION**

**A CASE STUDY AT THE GOVERNMENT OF PEKALONGAN REGENCY
AND PEKALONGAN MUNICIPALITY**

**Dyah Permana Erawaty
Sanata Dharma University
Yogyakarta 2006**

The research aimed to know the regional financial capability development, and to know the regional potential that had become supreme sector during the implementation of regional autonomy.

This research was a case study at the government of Pekalongan Regency and Pekalongan Municipality. In order to collect the data, the researcher used library survey, interview, and the documentation. In the analysis, the researcher used the comparison between the PAD (Regional Original Income) and TPD (Total Regional Income); the comparison between BHP (Tax-Non Taxes Share) and TPD; the comparison between SB (Grant) and TPD, Trend Analysis, LQ (Location Quotient) Analysis.

The result of this research showed that DOFD (Regional Fiscal Autonomy Degree) Pekalongan Regency from the ratio between PAD and TPD and from BHP and TPD was fluctuating, while from the ratio between SB and TPD was decreasing. DOFD Pekalongan Municipality from the ratio between PAD and TPD was increasing, from ratio between BHP and TPD was fluctuating and from ratio between SB and TPD inclined to increase. The Local potential of Pekalongan Regency had become supreme sector. Local potential of Pekalongan Municipality had not become supreme sector yet.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas segala hikmat, berkat, rahmat, karunia, bimbingan dan kasih-Nya sehingga tugas penyusunan skripsi dapat terselesaikan.

Tugas akhir ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai derajat Sarjana Ekonomi (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta berupa penelitian mengenai “Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Potensi Daerah Sebagai Sektor Unggulan Selama Pelaksanaan Otonomi Daerah”.

Dalam pelaksanaan penelitian tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Romo Dr. Ir. P. Wiryono P., S.J., selaku Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Alex Kahu Lantum, M.S., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
3. Bapak Ir. Drs. Hansiadi Yuli Hartanto, M.Si., Akt, selaku Kaprodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
4. Ibu Fr. Reni Retno A., S.E., M.Si., Akt., sebagai Pembimbing I yang telah dengan sabar memberikan masukan, bimbingan dan pengarahan selama penelitian hingga penulisan tugas akhir ini.

5. Ibu M. T. Ernawati, S.E., M.A., sebagai Pembimbing II yang telah dengan sabar memberikan masukan, bimbingan dan pengarahan selama penelitian hingga penulisan tugas akhir ini.
6. Bapak-bapak dan ibu-ibu staf Setda Bagian Keuangan dan Bappeda Kota Pekalongan atas masukan dan bantuannya kepada penulis dalam mencari data sampai selesainya penulisan tugas akhir ini.
7. Bapak-bapak dan ibu-ibu staf Bappeda Kabupaten Pekalongan atas masukan dan bantuannya kepada penulis dalam mencari data sampai selesainya penulisan tugas akhir ini.
8. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang turut membantu proses belajar penulis selama kuliah.
9. Papa dan mama tersayang dan adik-adikku yang banyak membantu proses pengetikan dan selalu memberikan dukungan doa dan motivasi serta setia mendengarkan keluhanku dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Meine Liebste Yudha yang selalu mengisi kekosongan hati saat aku hampir terpuruk, dengan sabar menghadapi aku yang egois dan memberikan apa yang aku butuhkan. Terima kasih atas kenangan terindah yang pernah kita lalui bersama.
11. Ing-ing teman pertamaku di Jogja yang sampai akhir selalu sabar mendampingi, memberi saran, menghadapi diriku yang sering menyebalkan dan telah menjadi sahabatku yang terbaik.
12. Mba Eno yang paling banyak berjasa dalam memberikan ide penulisan dan persiapan pendadaran, Thanks a lot mba. Tanpamu apa jadinya skripsiku.

13. Bunda dan Om Koko, Mba Danie, Dik Ito, terima kasih telah memberikan dorongan. Banyak kenangan yang sangat berkesan bagiku, membangun diriku hingga seperti ini.
14. Teman-teman terdekatku: Valentina Ari Sapi, Kristina Nonot, Harta, Bayu, Yus, Noni, Dedi, Nyonyo, Gagat, Anin, Bimo, Edo, Mita, Katri, Wawan terima kasih buat kebersamaan yang sangat menyenangkan.
15. Teman-temanku: Hendra, Silvi, Radix, Deasy, Rina, Rini, Heni, Rizka, Galih, Sabdo, Doni, Sidhi, terima kasih telah menjadi temanku yang menghilangkan sepiku.
16. Teman-teman Syantikara, Selly, Dina, Kak Dina, Kak Diah dan Kak Findot yang telah menyegarkan duniaku, terimakasih atas tumpangnya di akhir pekan.
17. Teman-teman Deutch Kurs, Mas Andi, Pak Fredy, Mias Luthfi, Mba Edna, Maruhal, Tam-Tam, Decy, Wir alles freund ja. Ach so, also Herr Widodo.
18. Semua pihak yang tidak dapat disebut namanya satu persatu di sini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukannya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Tuhan Yesus memberkati.

Yogyakarta, 2 Agustus 2006

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Batasan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	5
BAB II. LANDASAN TEORI	7
A. Pengertian Otonomi Daerah	7
B. Kemampuan Keuangan Daerah	8

C. Transfer Pemerintah	13
D. Pendapatan Asli Daerah	14
E. Sektor Unggulan	15
F. Potensi Daerah	16
G. Pertumbuhan Ekonomi dan Otonomi Daerah	17
BAB III. METODA PENELITIAN	20
A. Jenis Penelitian	20
B. Waktu dan Tempat Penelitian	20
C. Subjek dan Objek Penelitian	20
D. Data yang Diperlukan	20
E. Teknik Pengumpulan Data	21
F. Teknik Analisis Data	22
BAB IV. GAMBARAN UMUM	28
A. KABUPATEN PEKALONGAN	28
1. Kondisi Geografis	28
2. Iklim	29
3. Pemerintah Daerah	29
4. Pembagian Wilayah	30
5. Kependudukan	30
6. Tenaga Kerja	31
7. Ekonomi	31
B. KOTA PEKALONGAN	37
1. Kondisi Geografis	37

2. Iklim	38
3. Pemerintah Daerah	38
4. Pembagian Wilayah	39
5. Kependudukan	39
6. Tenaga Kerja	40
7. Transportasi.....	41
8. Ekonomi	42
BAB V. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	46
A. Analisis Data	46
B. Pembahasan	51
BAB VI. PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Kategori Kemampuan Keuangan Daerah	11
Tabel II.2	Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah	13
Tabel III.1	Kategori Kemampuan Keuangan Daerah	23
Tabel IV.1	Realisasi Pendapatan & Belanja APBD Kabupaten Pekalongan Tahun 2004.....	32
Tabel IV.2	PDRB dan Distribusi % PDRB Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Pekalongan Atas Dasar Harga Konstan 1993	35
Tabel IV.3	Jumlah Kelurahan, RW & RT di Kota Pekalongan.....	39
Tabel IV.4	Banyaknya Pekerja Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan di Kota Pekalongan Tahun 2004.....	40
Tabel IV.5	Realisasi Pendapatan & Belanja APBD Kota Pekalongan Tahun 2004	42
Tabel IV.6	PDRB dan Distribusi % PDRB Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Pekalongan Atas Dasar Harga Konstan 1993.....	44
Tabel V.1	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pekalongan	46
Tabel V.2	Total Penerimaan Daerah Kabupaten Pekalongan	46
Tabel V.3	Realisasi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kabupaten Pekalongan	47

Tabel V.4	Realisasi Sumbangan dan Bantuan Kabupaten Pekalongan	48
Tabel V.5	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan	48
Tabel V.6	Total Penerimaan Daerah Kota Pekalongan	49
Tabel V.7	Realisasi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kota Pekalongan	49
Tabel V.8	Realisasi Sumbangan dan Bantuan Kota Pekalongan	50
Tabel V.9	Rasio PAD terhadap TPD Kabupaten Pekalongan	51
Tabel V.10	Rasio BHP terhadap TPD Kabupaten Pekalongan	55
Tabel V.11	Rasio Sumbangan Bantuan terhadap TPD Kabupaten Pekalongan	58
Tabel V.12	Rasio PAD terhadap TPD Kota Pekalongan	62
Tabel V.13	Rasio BHP terhadap TPD Kota Pekalongan	65
Tabel V.14	Rasio Sumbangan Bantuan terhadap TPD Kota Pekalongan	69
Tabel V.15	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 1993 Kabupaten Pekalongan	77
Tabel V.17	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha	

Atas Dasar Harga Konstan 1993 Kota Pekalongan	77
Tabel V.18 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha	
Atas Dasar Harga Konstan 1993 Propinsi Jawa Tengah	78
Tabel V.19 Hasil Perhitungan LQ Kabupaten	
Pekalongan	78
Tabel V.20 Hasil Perhitungan LQ Kota Pekalongan	79

DAFTAR BAGAN

Bagan V.1	Trend Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten	
	Pekalongan	54
Bagan V.2	Trend Derajat Otonomi Perpajakan Kabupaten	
	Pekalongan	57
Bagan V.3	Trend Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan Kabupaten	
	Pekalongan	60
Bagan V.4	Trend Derajat Otonomi Fiskal Kota Pekalongan	64
Bagan V.5	Trend Derajat Otonomi Perpajakan Kota Pekalongan	68
Bagan V.6	Trend Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan Kota	
	Pekalongan	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketetapan MPR No.XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah yang berlaku secara efektif sejak awal Januari 2001 telah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional untuk mengatur dan membangun daerahnya dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah direalisasikan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Konsekuensi dari pemberlakuan undang-undang tersebut adalah menempatkan seluruh kewenangan pemerintahan pada Daerah Kabupaten dan Kota, kecuali kewenangan-kewenangan tertentu yang ditetapkan sebagai kewenangan Propinsi dan kewenangan Pusat. Kewenangan Propinsi terbatas pada bidang-bidang yang bersifat lintas Daerah Kabupaten atau Kota, atau kewenangan yang belum dapat dilaksanakan oleh Daerah atau Kota. Kewenangan Pusat antara lain meliputi lima bidang strategis, yaitu politik luar negeri, agama, ekonomi moneter, pertahanan dan keamanan, dan hukum/peradilan. Pemerintah Kabupaten atau Kota diharapkan mampu

mandiri di dalam menyelenggarakan pemerintahan, menentukan kebijakan pembangunan serta pendanaan sehingga mampu untuk meningkatkan kemampuan dalam merencanakan, menggali, mengelola, dan menggunakan sumber-sumber potensi yang dimiliki daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah ini menandai dimulainya sebuah babak baru dalam pembangunan daerah. Terlepas dari ketidaksiapan pemerintah daerah di berbagai bidang, otonomi daerah diyakini oleh banyak ahli ekonomi merupakan jalan terbaik dalam rangka mendorong pembangunan daerah. Otonomi berkaitan erat dengan kemampuan keuangan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi itu sendiri agar titik optimal dalam penyerahan tanggung jawab untuk mendukung terciptanya *good governance* dapat dicapai. Untuk itu diperlukan studi guna menganalisis kemampuan keuangan dalam rangka pelaksanaan otonomi.

Pemberian otonomi kepada pemerintah daerah merupakan bentuk dari sistem desentralisasi dengan menitikberatkan pada demokratisasi pemerintah daerah dan pemberdayaan masyarakat. Terdapat banyak alasan dan tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian otonomi kepada pemerintah daerah, yang pada prinsipnya adalah otonomi daerah mutlak diperlukan pemerintah daerah. Namun masalahnya, dengan kewenangan yang sangat luas yang diberikan kepada daerah seharusnya didukung oleh kesiapan daerah dalam menjalankan otonomi daerah itu sendiri, terutama kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No 105 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ditegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif dan transparan serta akuntabel dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Menurut Halim (2004; 20), manajemen keuangan daerah adalah pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya dan kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan daerah. Kekayaan yang ada pada suatu daerah disebut juga potensi daerah. Potensi daerah yang ada terkadang tidak mampu diolah oleh Pemerintah untuk dapat dijadikan suatu sektor unggulan yang dapat memberikan pendapatan daerah yang tinggi. Pendapatan daerah ini akan berpengaruh terhadap kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Pekalongan merupakan suatu wilayah yang terletak di jaiur pantai utara yang memiliki potensi daerah yang cukup banyak antara lain sektor industri, sektor kehutanan, sektor pertanian, dan yang terbesar adalah sektor perikanan. Sektor industri yang berupa industri batik juga menjadi salah satu potensi Kota dan Kabupaten Pekalongan.

Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang sektor unggulan dan kemampuan keuangan daerah Kabupaten dan Kota Pekalongan selama pelaksanaan otonomi daerah. Hal lain yang menyebabkan penulis tertarik adalah seringnya terjadi kerusuhan di Pekalongan yang menyebabkan pemerintah daerah Pekalongan harus sering menata perekonomiannya. Di samping itu, saat ini banyak industri di Pekalongan yang gulung tikar. Padahal

industri tersebut cukup memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah Pekalongan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan kemampuan keuangan daerah Kabupaten dan Kota Pekalongan selama pelaksanaan otonomi daerah?
2. Apakah potensi daerah Kabupaten dan Kota Pekalongan telah menjadi sektor unggulan selama pelaksanaan otonomi daerah?

C. Batasan Masalah

Dari rumusan masalah di atas, peneliti hanya melihat struktur penerimaan daerah terutama penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui perkembangan kemampuan keuangan Kabupaten dan Kota Pekalongan.
2. Mengetahui potensi daerah yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten dan Kota Pekalongan.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Kota dan Kabupaten Pekalongan

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kota dan Kabupaten Pekalongan dalam menentukan kebijakan di bidang fiskal daerah, terutama untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah dalam membiayai pembangunan.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah referensi kepustakaan.

3. Bagi Penulis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang kemampuan keuangan daerah Kota dan Kabupaten Pekalongan dan untuk menerapkan teori yang diperoleh selama kuliah ke dalam praktik yang sesungguhnya.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan otonomi daerah dan sektor unggulan. Kemudian akan dibahas

pula tentang kemampuan keuangan daerah, transfer pemerintah, pendapatan asli daerah, potensi daerah, teori basis ekonomi, teori kutub pertumbuhan, pertumbuhan ekonomi dan otonomi daerah.

BAB III : METODA PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, data yang diperlukan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM KOTA DAN KABUPATEN PEKALONGAN

Bab ini berisi tentang situasi dan kondisi Kota dan Kabupaten Pekalongan secara umum meliputi sejarah singkat berdirinya Kota dan Kabupaten Pekalongan, kondisi geografis, iklim, pemerintah daerah, pembagian wilayah, kependudukan, tenaga kerja, transmigrasi, transportasi, pos dan komunikasi, kekayaan alam, nilai-nilai budaya, dan ekonomi.

BAB V : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang diskripsi data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis penelitian, serta saran-saran yang diperlukan yang berkaitan dengan analisis kemampuan keuangan daerah dan pemanfaatan potensi daerah sebagai sektor unggulan selama pelaksanaan otonomi daerah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, otonomi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah mengandung makna beralihnya sebagian besar proses pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah yang merupakan penerapan konsep teori *area division of power* yang membagi kekuasaan secara vertikal suatu negara. Dalam sistem ini, kekuasaan negara akan terbagi antara pemerintah pusat di satu pihak dan pemerintah daerah di lain pihak. (Koswara,1999:37)

B. Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah menurut Widodo (2003; 21) adalah kemampuan daerah dalam membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahnya yang diukur dari rasio antara Pendapatan Asli Daerah dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang dinyatakan dalam persentase. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilihat dari dua sisi baik dari sisi penerimaan maupun dari sisi pengeluaran.

Kemampuan keuangan daerah dianalisis dengan melihat (Widodo, 2003:21):

1. Struktur penerimaan daerah yang terdiri dari:

Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Sumbangan dan Bantuan, Sisa lebih perhitungan tahun lalu.

2. Struktur Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari:

Pajak daerah, Retribusi daerah, Laba BUMD, Penerimaan lain-lain.

3. Indeks Kemampuan Rutin (IKR)

Indeks Kemampuan Rutin adalah salah satu indikator derajat otonomi keuangan daerah dari sisi pengeluaran yang mengukur seberapa besar kemampuan Pendapatan Asli Daerah membiayai pengeluaran rutin suatu daerah.

4. Derajat Otonomi Fiskal Daerah

Derajat otonomi fiskal daerah dapat dianalisis dengan membandingkan rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah, Rasio Sumbangan dan Bantuan pusat terhadap Total Penerimaan Daerah, dan

Rasio Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap Total Penerimaan Daerah.

Otonomi fiskal merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari otonomi daerah secara keseluruhan. Hal ini disebabkan karena pengertian otonomi fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan milik daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Namun demikian, harus diakui bahwa derajat otonomi fiskal daerah di Indonesia masih rendah. Rendahnya derajat otonomi fiskal di Indonesia juga tercermin dari indeks kemampuan rutin dari masing-masing daerah baik kabupaten maupun propinsi seluruh Indonesia yang artinya bahwa Pendapatan Asli Daerah dari masing-masing daerah di seluruh Indonesia belum mampu membiayai pengeluaran rutin (Tumilar, 1997:12).

Derajat Otonomi Fiskal menjelaskan mengenai kemampuan suatu daerah dalam membiayai program pembangunannya berdasarkan Pendapatan Asli Daerah. Ukuran yang digunakan untuk mengukur Derajat Otonomi Fiskal Daerah dapat dilihat dari struktur penerimaan daerah dengan menggunakan *administrative independency ratio*, yaitu rasio antara Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Rasio yang dimaksud berkisar antara 0-1. Semakin mendekati 1, Derajat Otonomi Fiskal suatu daerah semakin tinggi dan sebaliknya semakin rendah bila rasio mendekati 0 (Tumilar, 1997:12).

Menurut Reksohadiprodjo (2000: 155) Derajat Otonomi Fiskal

Daerah dapat diukur dengan cara sebagai berikut:

$$a. \quad \text{DOF} = \frac{\text{PAD}}{\text{TPD}} \times 100 \%$$

$$b. \quad \text{DOP} = \frac{\text{BHP}}{\text{TPD}} \times 100 \%$$

$$c. \quad \text{DOB} = \frac{\text{B}}{\text{TPD}} \times 100\%$$

Dimana:

DOF = Derajat Otonomi Fiskal

PAD = Pendapatan Asli Daerah

TPD = Total Penerimaan Daerah

DOP = Derajat Otonomi Perpajakan

BHP = Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

DOB = Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan

B = Subsidi atau Bantuan yang diterima Pemda

Derajat Otonomi Fiskal menjelaskan tentang kemampuan keuangan suatu daerah dalam membiayai program pembangunannya berdasarkan Pendapatan Asli Daerah.

Dari ketiga rumus di atas, kemampuan keuangan daerah diukur secara langsung oleh Derajat Otonomi Fiskal. Jika Derajat Otonomi Fiskal tinggi, maka kemampuan keuangannya baik. Kategori kemampuan keuangan daerah dilihat dari nilai Derajat Otonomi Fiskal disajikan dalam tabel 2.1. Derajat Otonomi Perpajakan dan Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan secara

tidak langsung menunjukkan kemampuan keuangan daerah. Derajat Otonomi Perpajakan yang tinggi menunjukkan daerah tersebut mampu membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahnya melalui Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dengan kata lain kemampuan keuangannya baik. Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan yang tinggi menunjukkan Sumbangan dan Bantuan yang digunakan daerah tersebut masih tinggi yang berarti Ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih tinggi atau kemampuan keuangan daerah tersebut masih kurang.

Kategori kemampuan keuangan daerah dilihat dari derajat otonomi fiskal adalah:

Tabel II.1
Kategori Kemampuan Keuangan Daerah

Kisaran (DOF)	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00% - 10,00%	Sangat Kurang
10,10% - 20,00%	Kurang
20,10% - 30,00%	Sedang
30,10% - 40,00%	Cukup
40,10% - 50,00%	Baik
> 50,00%	Sangat Baik

Sumber : Hendrik, 2000 : 35

Pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan Derajat Otonomi Fiskal menurut Reksohadiprodjo (1999:3) dapat dibedakan menjadi empat macam klasifikasi daerah yaitu :

1. Daerah yang kurang atau tidak mampu melaksanakan urusan otonominya, pola hubungan yang dipergunakan adalah pola hubungan instruktif dimana pemerintah pusat lebih banyak memberikan pengarahan kepada pemerintah daerah
2. Daerah yang sedikit mampu melaksanakan urusan otonominya, pola hubungan yang dipergunakan adalah pola hubungan konsultatif yaitu sudah mulai berkurangnya pengarahan atau campur tangan pemerintah pusat karena kemampuan daerah meningkat.
3. Daerah yang mendekati mampu melaksanakan urusan otonominya, pola hubungan yang dipergunakan adalah pola hubungan partisipatif, dimana pemerintah pusat semakin berkurang dalam memberi pengarahan mengingat pemerintah daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya sudah lebih tinggi.
4. Daerah yang tergolong mampu melaksanakan urusan otonominya, pola hubungan yang dipergunakan adalah pola hubungan delegatif, dimana pemerintah pusat sudah mengurangi atau meniadakan campur tangan dalam mengurus urusan otonominya karena pemerintah daerah yang bersangkutan benar-benar telah matang dan mampu untuk mandiri.

Bertolak dari teori tersebut, untuk melihat pola hubungan daerah dengan kemampuan keuangan daerah dapat ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2

Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah

Kemandirian (%) (DOF)	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
0 – 25	Rendah Sekali	Instruktif
25 – 50	Rendah	Konsultatif
50 – 75	Sedang	Partisipatif
75 - 100	Tinggi	Delegatif

Sumber : Halim, 2004 : 189

C. Transfer Pemerintah

Transfer Pemerintah dalam istilah lain dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah sumbangan dan bantuan. Sumbangan adalah pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi serta sumbangan lain yang diatur dengan undang-undang. Jenis sumbangan ini antara lain: ganjaran, subsidi/perimbangan keuangan, subsidi bantuan penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri, subsidi bantuan biaya operasional Rumah Sakit Umum Daerah, subsidi pengembangan objek wisata, tunjangan penghasilan kepala desa, dan lain-lain (Halim, 2004:52).

Bantuan adalah sejenis bantuan atas Instruksi Presiden (Inpres) yang digunakan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi. Secara umum, bantuan (*grant*) pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat dibedakan dalam dua macam (Halim, 2004:52-54) :

- a. Bantuan umum (*general grant/unconditional grant*), yaitu bantuan yang diberikan kepada daerah untuk menyediakan pelayanan atau jasa-jasa publik yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat.
- b. Bantuan khusus (*specific grant/conditional grant*), yaitu bantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah yang tidak disertai dengan ikatan atau syarat tertentu dalam arti daerah tersebut dapat menggunakan atau mengalokasikannya untuk tujuan yang dikehendaki oleh daerah yang bersangkutan.

D. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-undang No.32 Tahun 2004, sumber-sumber pendapatan dalam rangka pelaksanaan otonomi terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah yang mencakup:
 - i. Hasil Pajak Daerah
 - ii. Hasil Retribusi Daerah
 - iii. Hasil Perusahaan Milik Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - iv. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- b. Dana Perimbangan
 - i. Bagian Daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta Penerimaan dari sumber daya alam.
 - ii. Dana Alokasi Umum (DAU)

iii. Dana Alokasi Khusus (DAK)

c. Pinjaman Daerah

d. Lain-lain penerimaan yang sah.

Menurut Ismanthono (2003:124), Pendapatan Asli Daerah merupakan keuangan daerah yang berasal dari potensi daerah sendiri dan bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah, dinas daerah, dan lain-lain usaha yang sah.

Undang-undang No.33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah sangat berperan dalam perekonomian daerah dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang paling dominan karena kemampuan suatu daerah dalam membiayai urusan rumah tangganya dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah dan Derajat Otonomi Fiskal merupakan tolok ukur pelaksanaan otonomi daerah, dimana semakin banyak kebutuhan daerah dapat dibiayai dengan Pendapatan Asli Daerah berarti semakin tinggi kualitas otonomi suatu daerah dan semakin tinggi Derajat Otonomi Fiskal memperlihatkan kesiapan suatu daerah dalam berotonomi.

E. Sektor Unggulan

Sektor Unggulan adalah sektor dalam perekonomian yang mampu sebagai penggerak utama untuk memacu laju pembangunan di suatu negara

atau daerah. Mengacu pada teori basis ekonomi, maka sektor unggulan dikenal dengan istilah sektor basis (yang terdapat dalam *basic activities*).

Dalam teori basis ekonomi, analisis perekonomian daerah/regional diklasifikasikan menjadi dua sektor kegiatan yaitu (Arsyad, 2004; 300) :

1. Kegiatan-kegiatan basis (*basic activities*), adalah kegiatan-kegiatan mengekspor barang dan jasa ke tempat-tempat di luar batas-batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan atau kepada orang-orang yang datang dari luar wilayah perekonomian bersangkutan.
2. Kegiatan-kegiatan yang bukan basis (*non basic activities*), adalah kegiatan-kegiatan menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang-orang yang bertempat tinggal di dalam batas-batas perekonomian masyarakat daerah yang bersangkutan, kegiatan ini tidak mengekspor barang dan jasa, produksi dan pemasaran terbatas pada wilayah daerah yang bersangkutan.

F. Potensi Daerah

Potensi daerah (Kementrian Komunikasi dan Informasi RI, 2001: 46) adalah sesuatu yang tersimpan atau terkandung pada suatu lokasi akibat daerah tersebut memiliki berbagai faktor, antara lain posisi atau letak, akses (misalnya letak jauh namun dapat dicapai akibat tersedianya prasarana pergerakan yang dapat dibangun sejauh memenuhi suatu kondisi kelayakan tertentu), atau sesuatu yang tersimpan di dalam daerah tersebut; yang

tersimpan inilah yang disebut sebagai Sumber Daya (baik manusia maupun natural).

Suatu potensi daerah lokasinya dapat dinyatakan oleh Pemerintah Daerah setempat (berdasar hasil suatu riset), di sisi lain, berdasarkan analisis data dan informasi sumber daya yang ada, pihak investor dapat juga menyatakan suatu potensi daerah di suatu lokasi tertentu.

G. Pertumbuhan Ekonomi dan Otonomi Daerah

Menurut Yusuf (2001:18) pelaku otonomi daerah akan memberikan keleluasaan (*discretionary power*) bagi pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan dan pemanfaatan dana yang diperoleh pemerintah daerah. Dengan adanya kebebasan dalam memanfaatkan dana bagi daerah, maka pemerintah daerah yang selama ini terbelenggu dengan aturan pemerintah pusat yang dinilai kaku, akan dapat menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekaligus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini sejalan dengan pendapat Sumodiningrat (1999:1-16) yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan yang disusun dari daerah perlu didasarkan pada kenyataan semua potensi dan kendala yang ada di daerah, dengan tetap mengacu kepada perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan yang didasarkan pada potensi wilayah akan menghasilkan pertumbuhan sosial ekonomi yang optimal.

Teori yang mendukung pertumbuhan ekonomi dengan berdasarkan pada potensi wilayah adalah teori kutub pertumbuhan. Teori kutub pertumbuhan dipopulerkan oleh seorang ekonom Perancis bernama Francois Perroux, sehingga teori ini juga dikenal dengan teori Perroux. Teori ini merupakan teori yang menjadi dasar dari strategi kebijaksanaan pembangunan industri daerah. Perroux berpendapat bahwa pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada waktu yang sama. Pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat yang disebut kutub pertumbuhan atau pusat pertumbuhan. Inti dari teori Perroux adalah sebagai berikut (Arsyad,1999:147-148) :

- a. Dalam proses pembangunan akan timbul industri unggulan (*L'industri matrice*) yang merupakan industri penggerak utama dalam pembangunan suatu daerah. Karena keterkaitan industri sangat erat, maka perkembangan industri unggulan akan mempengaruhi perkembangan industri lain yang berhubungan erat dengan industri unggulan tersebut.
- b. Pemusatan industri pada suatu daerah akan mempercepat pertumbuhan perekonomian karena pemusatan industri akan menciptakan pola konsumsi yang berbeda antar daerah sehingga perkembangan industri di daerah tersebut akan mempengaruhi perkembangan daerah-daerah lainnya.
- c. Perekonomian merupakan gabungan dari sistem industri yang relatif aktif (industri unggulan) dengan industri-industri yang relatif pasif yaitu industri yang tergantung dari industri unggulan, atau pusat

pertumbuhan daerah yang relatif maju atau aktif akan mempengaruhi daerah-daerah yang relatif pasif atau terjadi *spread effect*.

Teori lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan potensi daerah adalah teori basis ekonomi. Menurut Arsyad (2004:300), faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (*job creation*).

Strategi pembangunan daerah yang muncul yang didasarkan pada teori basis ekonomi adalah penekanan terhadap arti penting bantuan kepada dunia usaha yang mempunyai pasar secara nasional maupun internasional. Implementasi kebijakannya mencakup pengurangan hambatan/batasan terhadap perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor yang ada dan akan didirikan di daerah tersebut.

Kelemahan model ini adalah model ini didasarkan pada permintaan eksternal bukan internal yang pada akhirnya akan menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kekuatan-kekuatan pasar secara nasional maupun global. Namun demikian, model ini sangat berguna untuk menentukan keseimbangan antara jenis-jenis industri dan sektor yang dibutuhkan masyarakat untuk mengembangkan stabilitas ekonomi (Arsyad: 2004, 300).

BAB III

METODA PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari objek yang diteliti, serta interaksinya dengan lingkungan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi kasus pada Kabupaten dan Kota Pekalongan.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian : Maret – Mei 2006
2. Tempat Penelitian : Kabupaten dan Kota Pekalongan

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian : Pemerintah Kota dan Kabupaten Pekalongan
2. Objek Penelitian :
 - a. Kemampuan Keuangan Kabuapten dan Kota Pekalongan
 - b. Potensi daerah Kota dan Kabupaten Pekalongan

D. Data Yang Diperlukan

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data runtun waktu (*time series*) selama otonomi di Kabupaten dan Kota Pekalongan yang terdiri dari :

1. Gambaran Umum Daerah Kabupaten dan Kota Pekalongan.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tanpa transfer pemerintah tahun 2001 – 2004.
3. Produk Domestik Regional Bruto tahun 2001 - 2004 atas dasar harga konstan 1993.
4. Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Jawa Tengah tahun 2001 – 2004 atas dasar harga konstan 1993.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini digunakan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu :

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk mendapatkan landasan teori yang mendukung penulisan dan disarikan dalam bentuk literatur atau buku-buku karangan ilmiah maupun hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
2. Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dengan cara :
 - a. Wawancara, yaitu dengan cara berdialog langsung dengan staf Dinas Pendapatan Daerah, Badan Pusat Statistik, dan Bappeda.
 - b. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari catatan-catatan dan dokumen-dokumen historis yang berhubungan dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama digunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghitung Derajat Otonomi Fiskal Daerah.

Menurut Reksohadiprodjo (2000: 155) Derajat Otonomi Fiskal Daerah dapat diukur dengan cara sebagai berikut:

$$\text{a. } \text{DOF} = \frac{\text{PAD}}{\text{TPD}} \times 100 \%$$

$$\text{b. } \text{DOP} = \frac{\text{BHP}}{\text{TPD}} \times 100 \%$$

$$\text{c. } \text{DOB} = \frac{\text{B}}{\text{TPD}} \times 100\%$$

Dimana:

DOF = Derajat Otonomi Fiskal

PAD = Pendapatan Asli Daerah

TPD = Total Penerimaan Daerah

DOP = Derajat Otonomi Perpajakan

BHP = Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

DOB = Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan

B = Subsidi atau Bantuan yang diterima Pemda

Dari ketiga rumus di atas, kemampuan keuangan daerah diukur secara langsung oleh Derajat Otonomi Fiskal. Jika Derajat Otonomi Fiskal

tinggi, maka kemampuan keuangannya baik. Kategori kemampuan keuangan daerah dilihat dari nilai Derajat Otonomi Fiskal disajikan dalam Tabel III.1. Derajat Otonomi Perpajakan dan Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan secara tidak langsung menunjukkan kemampuan keuangan daerah. Derajat Otonomi Perpajakan yang tinggi menunjukkan daerah tersebut mampu membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahnya melalui Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dengan kata lain kemampuan keuangannya baik. Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan yang tinggi menunjukkan Sumbangan dan Bantuan yang digunakan daerah tersebut masih tinggi yang berarti ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih tinggi atau kemampuan keuangan daerah tersebut masih rendah. Kategori kemampuan keuangan daerah dilihat dari derajat otonomi fiskal adalah:

Tabel III.1
Kategori Kemampuan Keuangan Daerah

Kisaran (DOF)	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00% - 10,00%	Sangat Kurang
10,10% - 20,00%	Kurang
20,10% - 30,00%	Sedang
30,10% - 40,00%	Cukup
40,10% - 50,00%	Baik
> 50,00%	Sangat Baik

Sumber : Hendrik, 2000 : 35

2. Dari hasil perhitungan Derajat Otonomi Fiskal, dibuat suatu garis trend yang akan menggambarkan perkembangan kemampuan keuangan daerah kabupaten dan kota Pekalongan serta tingkat ketergantungan kepada Pemerintah Pusat dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004.

Analisis trend ini dilakukan dengan menggunakan Metode Jumlah Kuadrat Terkecil (*Least Square's Method*).

Bentuk persamaan garis trend yang digunakan adalah

$$Y' = a + bX$$

Dalam analisis ini akan digambarkan tiga trend yaitu trend DOF (Y_{DOF}), trend DOP (Y_{DOP}), trend DOB (Y_{DOB}).

Langkah-langkah dalam menentukan garis trend (Boedijoewono, 2001: 230) adalah sebagai berikut:

a. Menentukan a dengan rumus:

$$a = \sum Y/N$$

b. Menentukan b dengan rumus :

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

c. Menentukan persamaan garis trend:

$$Y' = a + bX$$

Dimana:

Y' = trend

Y = Derajat Otonomi Fiskal, Derajat Otonomi Perpajakan, Derajat Otonomi Sumbangan Dan Bantuan

X = Nilai variabel independen dalam analisis trend adalah waktu

a = konstanta (nilai Y' jika X = 0 yaitu akhir tahun 2002 atau awal tahun 2003)

b = kemiringan

Jika nilai b positif, maka:

- i. Derajat Otonomi Fiskal semakin tinggi yang berarti kemampuan keuangan daerah semakin baik dan tingkat ketergantungan kepada Pemerintah Pusat semakin rendah.
- ii. Derajat Otonomi Perpajakan semakin tinggi yang berarti kemampuan keuangan daerah semakin baik dalam pemanfaatan dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak bagi pembiayaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
- iii. Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan semakin tinggi yang berarti peranan Sumbangan dan Bantuan terhadap Total Penerimaan Daerah semakin besar dan tingkat ketergantungan kepada Pemerintah Pusat dari Sumbangan dan Bantuan semakin tinggi.



Langkah-langkah untuk menjawab masalah yang kedua adalah sebagai berikut:

1. Menguraikan potensi-potensi daerah yang ada di Kabupaten dan Kota Pekalongan.
2. Analisis *Location Quotient* (LQ)

Analisis *Location Quotient* merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan (industri) dalam suatu daerah dengan cara membandingkan peranannya dalam perekonomian daerah itu dengan peranan kegiatan atau industri sejenis dalam perekonomian regional atau nasional. (Arsyad, 1999 : 315-317)

Dengan mengacu pada model pendekatan *Location Quotient* (Blakely, 1994:93), LQ dapat dirumuskan dalam bentuk persamaan sebagai berikut :

$$LQ = \frac{PDRB_{ik} / TPDRB_k}{PDRB_{ip} / TPDRB_p}$$

Dimana :

LQ = Koefisien *Location Quotient* Kabupaten/Kota

$PDRB_{ik}$ = Produk Domestik Regional Bruto sektor/subsektor i di Kabupaten/Kota

$TPDRB_k$ = Total Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota

$PDRB_{ip}$ = Produk Domestik Regional Bruto sektor/subsektor i di Propinsi

$TPDRB_p$ = Total Produk Domestik Regional Bruto di Propinsi

Setelah nilai LQ diperoleh maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bila LQ suatu sektor/subsektor > 1 , maka sektor/subsektor tersebut dapat dikatakan sebagai sektor/subsektor unggulan.
 - b. Bila LQ suatu sektor/subsektor < 1 , maka sektor/subsektor tersebut bukan merupakan sektor/subsektor unggulan.
 - c. Bila LQ suatu sektor/subsektor $= 1$, maka sektor/subsektor tersebut mempunyai kontribusi yang sama terhadap PDRB.
3. Membandingkan antara uraian dari potensi-potensi daerah yang telah diuraikan pada awal pembahasan dengan sektor unggulan hasil dari perhitungan analisis *Location Quotien*.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. KABUPATEN PEKALONGAN

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Pekalongan sebagai salah satu Kabupaten di wilayah Propinsi Jawa Tengah, terletak antara 6° - $7^{\circ}23'$ LS dan 109° - $109^{\circ}78'$ BT, sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Banjarnegara, sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Batang dan sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pemalang dengan pusat pemerintahan di Kajen.

Jarak dari Ibukota Kabupaten Pekalongan ke Ibukota:

Kabupaten Batang : 35 Km

Kabupaten Pemalang : 51 Km

Kabupaten Tegal : 94 Km

Kabupaten Brebes : 92 Km

Kota Pekalongan : 28 Km

Kota Tegal : 79 Km

2. Iklim

Pada tahun 2004, Kabupaten Pekalongan mengalami rata-rata curah hujan 3.049 mm dengan rata-rata hari hujan 132 hari. Untuk curah hujan tahun 2004 sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan keadaan tahun 2003 yang mengalami rata-rata curah hujan 3.097 mm dengan rata-rata hari hujan 142 hari. Curah hujan yang tertinggi terjadi di Kecamatan Lebakbarang sebesar 4.863 mm.

3. Pemerintah Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten pekalongan pada tahun anggaran 2004 tercaiat melaksanakan kegiatan rapat 378 kali dengan menghasilkan 215 keputusan. Apabila dibandingkan dengan kegiatan DPRD pada tahun anggaran 2003 terdapat 384 kali rapat menghasilkan 204 keputusan, berarti kegiatan rapat mengalami penurunan 14 kali rapat, namun keputusan yang dihasilkan mengalami peningkatan 9 buah keputusan.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2004 sebanyak 8.903 orang dan 1.629 tenaga honorer. Jumlah pegawai tersebut meliputi pegawai Pemerintah Kabupaten Pekalongan di lingkungan Sekretariat Daerah seperti Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan, Kelurahan, Sekretariat

KPU, dan instansi vertikal seperti Kepolisian republik Indonesia di Kabupaten Pekalongan.

4. Pembagian Wilayah

Wilayah Kabupaten Pekalongan memiliki luas \pm 836,13 Km², dimana 31,29 persennya merupakan lahan sawah dan 68,71 persen merupakan lahan kering (bukan lahan sawah). Terbagi dalam 19 Kecamatan dan 270 Desa serta 13 Kelurahan yang seluruhnya merupakan desa swasembada, serta meliputi 1.490 rukun warga (RW) dan 4.070 rukun tetangga (RT).

5. Kependudukan

Penduduk Kabupaten Pekalongan pada tahun 2001 tercatat 807.810 jiwa, terdiri dari 402.017 jiwa penduduk laki-laki dan 405.793 jiwa penduduk perempuan (sex ratio 99,07 %). Sementara pada tahun 2002 sebanyak 816.712 jiwa, yang terdiri dari 406.555 jiwa penduduk laki-laki dan 410.157 perempuan (sex ratio 99,12 %). Pada tahun 2003 dari hasil Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B), tercatat 841.708 jiwa, terdiri dari 422.458 laki-laki dan 419.250 perempuan (sex ratio 100,77 %).

Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2001 sebesar 0,34 persen, tahun 2002 sebesar 1,45 persen dan pada tahun 2003 sebesar 3,06 persen.

Besarnya laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2003 sebenarnya tidak menggambarkan pertumbuhan riil tapi lebih disebabkan perbedaan dalam metode perhitungan. Sampai dengan tahun 2002 menggunakan metode registrasi sedangkan pada tahun 2003 menggunakan metode sensus. Dengan membandingkan antara penduduk hasil Sensus Penduduk tahun 2000 dengan penduduk hasil P4B tahun 2003 akan menghasilkan pertumbuhan yang lebih riil yakni sebesar 1,52 persen (*Kantor BPS Kabupaten Pekalongan Tahun 2000*).

6. Tenaga Kerja

Pembangunan perlu perencanaan yang matang, termasuk merencanakan tenaga kerja yang dibutuhkan, agar pembangunan dapat berhasil dengan optimal. Tanpa tenaga kerja pembangunan tak mungkin dapat dihasilkan. Jumlah penduduk berusia 15 tahun keatas yang bekerja dirinci menurut lapangan kerja di Kabupaten Pekalongan tahun 2004 terlihat bahwa prosentase penyebaran tenaga kerja terbanyak adalah sektor pertanian tanaman pangan (27,40%), sedangkan yang paling kecil adalah sektor peternakan (0,01%).

7. Ekonomi

Dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Kabupaten Pekalongan menganut prinsip anggaran

berimbang dan dinamis. Berimbang berarti harus diusahakan seimbang antara penerimaan dan pengeluaran, sedangkan prinsip dinamis berarti semakin meningkatnya jumlah anggaran dan tabungan pemerintah, sehingga kemampuan daerah bertambah dalam menghadapi otonomi daerah terutama kemampuan keuangan daerah. Pada tahun 2004, realisasi penerimaan APBD Kabupaten Pekalongan dibanding dengan pengeluarannya menunjukkan posisi positif seperti yang terbaca di tabel IV.1 surplus sebesar Rp319.386.230).

Tabel IV.1
Realisasi Pendapatan & Belanja APBD
Kabupaten Pekalongan
Tahun 2004

URAIAN	REALISASI (Rp)
I PENDAPATAN	
1.1 Pendapat Asli Daerah	27,224,986,021
1.1.1 Pajak Daerah	6,507,371,256
1.1.2 Retribusi Daerah	4,888,197,949
1.1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	229,954,767
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	15,599,462,049
1.2 Dana Perimbangan	269,380,837,374
1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	16,862,100,144
1.2.2 Dana Alokasi Umum	233,319,000,000
1.2.3 Dana Alokasi Khusus	8,130,000,000
1.2.4 Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Provinsi	11,069,737,230
1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah	15,175,968,056
1.3.1 Bantuan Dana Kontijensi/Penyeimbang dari Pusat	15,175,968,056
JUMLAH PENDAPATAN	311,781,791,451

Lanjutan tabel IV.1

URAIAN	REALISASI (Rp)
II BELANJA	
APARATUR DAERAH	95,171,478,552
2.1.1 Belanja Administrasi Umum	82,883,905,430
2.1.1.1 Belanja Pegawai/Personalia	50,823,387,709
2.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa	27,165,722,697
2.1.1.3 Belanja Perjalanan Dinas	1,801,940,700
2.1.1.4 Belanja Pemeliharaan	3,092,854,324
2.1.2 Belanja Operasi dan Pemeliharaan	4,245,088,865
2.1.1.1 Belanja Pegawai/Personalia	575,586,800
2.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa	3,252,224,690
2.1.1.3 Belanja Perjalanan Dinas	280,924,575
2.1.1.4 Belanja Pemeliharaan	136,352,800
2.1.3 Belanja Modal	8,042,484,257
PELAYANAN PUBLIK	216,290,926,669
2.2.1 Belanja Administrasi Umum	137,616,128,824
2.2.1.1 Belanja Pegawai/Personalia	116,056,954,047
2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa	17,053,075,001
2.2.1.3 Belanja Perjalanan Dinas	265,994,000
2.2.1.4 Belanja Pemeliharaan	4,240,105,776
2.2.2 Belanja Operasi dan Pemeliharaan	16,498,172,386
2.2.2.1 Belanja Pegawai/Personalia	871,881,250
2.2.2.2 Belanja Barang dan Jasa	6,618,483,136
2.2.2.3 Belanja Perjalanan Dinas	912,876,500
2.2.2.4 Belanja Pemeliharaan	8,094,931,500
2.2.3 Belanja Modal	30,442,806,729
2.2.4 Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	26,870,026,905
2.2.5 Belanja Tidak Tersangka	4,863,791,825
JUMLAH BELANJA	311,462,405,221
SURPLUS / (DEFISIT)	319,386,230

Lanjutan tabel IV.1

URAIAN	REALISASI (Rp)
III PEMBIAYAAN	
3.1 Penerimaan Daerah	48,646,167,149
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu	15,333,661,929
3.1.2 Urusan Kas dan Perhitungan	20,046,588,609
3.1.3 Transfer dari Dana Cadangan	-
3.1.4 Transfer dari Penyertaan Modal (Deposito)	10,000,000,000
3.1.5 Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	-
3.1.6 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan	58,300,000
3.1.7 Penerimaan Piutang	-
3.1.8 Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	-
3.1.8 Penerimaan dari Kompensasi PPh Pasal 21	3,207,616,611
3.2 Pengeluaran Daerah	48,965,553,379
3.2.1 Transfer ke Dana Cadangan	1,413,000,000
3.2.2 Urusan Kas dan Perhitungan	20,046,588,609
3.2.3 Penyertaan Modal	-
3.2.4 Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	194,816,420
3.2.5 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	27,311,148,350
3.2.6 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	-
3.2.7 Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	-
3.2.8 Dana Talangan Produksi Pertanian	-
JUMLAH PEMBIAYAAN	(319,386,230)

Sumber : Bappeda Kabupaten Pekalongan

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan tahun 2003 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan tahun 1993 lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 3,57%. Hal ini terjadi karena sektor industri pengolahan khususnya sub sektor tekstil, barang kulit dan alas kaki mengalami kenaikan yang cukup berarti dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan riil secara sektoral tahun 2003 terlihat bervariasi, namun secara umum mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor industri pengolahan.

Pertumbuhan riil yang rendah dicapai oleh sektor bangunan sebesar 2,7%.

Sektor industri pengolahan memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Kabupaten Pekalongan yaitu sebesar 31,49%, sementara sektor keuangan yang diharapkan sebagai penunjang perekonomian memberikan peran 5,50%. Peranan sektor perdagangan, restoran dan hotel memberikan andil terbesar kedua setelah industri pengolahan sebesar 21,12%.

Tabel IV.2
PDRB dan Distribusi % PDRB
Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Pekalongan
Atas Dasar Harga Konstan 1993

Lapangan Usaha	2002 (Rp.000)	2003 (Rp.000)	Distribusi 2003 (%)
1. Pertanian	154.879.628	163.015.120	16,93
1.1 Tanaman Bahan Makanan	99.002.870	103.799.015	10,78
1.2 Tanaman Perkebunan	14.510.243	15.753.111	1,64
1.3 Peternakan	35.874.331	37.705.911	3,92
1.4 Kehutanan	2.012.599	2.037.573	0,21
1.5 Perikanan	3.479.585	3.719.510	0,39
2. Pertambangan & Penggalian	7.438.292	7.756.686	0,81
3. Industri Pengolahan	296.370.663	309.090.787	31,49
3.1 Makanan, Minuman & Tembakau	28.016.703	28.373.960	2,95
3.2 Tekstil, barang kulit & alas kaki	259.048.644	265.052.949	27,53
3.3 Tekstil, barang kulit & hasil hutan lain	2.915.854	3.004.768	0,31
3.4 Kertas & barang cetakan	16.656	17.145	0,00
3.5 Pupuk, Kimia & barang dari karet	4.889.153	5.114.723	0,53
3.6 Semen & barang lain bukan Logam	73.110	75.258	0,01
3.7 Logam dasar besi & baja	0	0	-
3.8 Alat angkutan, mesin & peralatan	255.182	262.679	0,03
3.9 Barang lainnya	1.155.360	1.189.305	0,12

Lapangan Usaha	2002 (Rp.000)	2003 (Rp.000)	Distribusi 2003 (%)
4. Listrik, Gas & Air Minum	8.902.436	9.253.994	0,96
4.1 Listrik	8.773.543	9.120.976	0,95
4.2 Air Minum	128.893	133.108	0,01
5. Bangunan	43.135.612	44.300.336	4,60
6. Perdagangan, Restoran & Hotel	196.791.934	203.334.627	21,12
6.1 Perdagangan Besar & Eceran	191.791.934	197.534.505	20,52
6.2 Restoran	5.325.977	5.728.556	0,60
6.3 Hotel	121.381	71.566	0,01
7. Pengangkutan & Komunikasi	43.860.809	46.666.133	4,85
7.1 Pengangkutan	36.942.753	39.313.608	4,23
7.1.1 Angkutan Jalan raya	36.779.910	39.146.233	4,21
7.1.2 Jasa Penunjang Angkutan	162.843	167.375	0,02
7.2 Komunikasi	6.910.056	7.352.525	0,79
7.2.1 Pos & Telekomunikasi	6.046.677	6.409.196	0,69
7.2.2 Jasa Telkom	871.380	943.329	0,10
8. Bank dan Lembaga Keuangan	50.490.456	52.988.022	5,50
8.1 Bank	17.520.428	18.643.589	1,94
8.2 Lembaga Keuangan Bukan Bank	6.034.924	6.696.550	0,70
8.3 Sewa Bangunan	25.994.226	26.594.267	2,76
8.4 Jasa Perusahaan	940.878	1.053.616	0,11
9. Jasa-jasa	127.589.196	132.212.367	13,73
9.1 Pemerintahan Umum	94.150.565	97.571.250	10,14
9.2 Swasta	33.438.631	34.641.117	3,60
9.2.1 Sosial Kemasyarakatan	12.170.137	13.009.836	1,35
9.2.2 Hiburan dan rekreasi	403.741	388.037	0,04
9.2.3 Perorangan dan Rumah Tangga	20.864.753	21.243.244	2,21
PDRB	929.459.026	962.618.072	100,00

Sumber : Bappeda Kabupaten Pekalongan

B. KOTA PEKALONGAN

1. Kondisi Geografis

Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai utara Pulau Jawa dengan ketinggian kurang lebih 1 meter di atas permukaan laut dengan posisi geografis antara 6°50'42" – 6°55'44" Lintang Selatan dan 109°37'55" – 109°42'19" Bujur Timur.

Batas-batas wilayah administratif sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Laut Jawa
Sebelah Timur	: Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang
Sebelah Selatan	: Kabupaten Pekalongan
Sebelah Barat	: Kabupaten Batang

Keadaan tanah di Kota Pekalongan berwarna agak kelabu dengan jenis tanah Aluvial kelabu kuning dan Aluvial *Yohidromorf*. Jarak terjauh dari Utara ke Selatan ± 9 Km dan dari Barat ke Timur ± 7 Km. Luas daerah Kota Pekalongan 42,25 Km².

Jarak dari Kota Pekalongan ke beberapa Ibu kota adalah:

Semarang	: 101 Km
Jakarta	: 384 Km
Bandung	: 266 Km
Surabaya	: 488 Km
Yogyakarta	: 219 Km
Kajen	: 28 Km
Batang	: 8 Km

Pemalang	: 35 Km
Tegal	: 65 Km
Slawi	: 80 Km
Brebes	: 78 Km

2. Iklim

Rata-rata curah hujan selama tahun 2004 berkisar antara 7 mm (bulan Agustus) sampai dengan 570 mm (bulan Februari). Keadaan angin pada musim hujan biasanya lebih kencang dan angin bertiup dari Barat dan Barat Laut (Musim Barat). Pada musim kemarau, angin timur bertiup dari Benua Australia yang keadaan anginnya juga kencang.

3. Pemerintah Daerah

Kota Pekalongan terbagi dalam 46 kelurahan, yang kesemuanya merupakan desa/kelurahan swasembada. Desa/Kelurahan tersebut tersebar di 4 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Pekalongan Barat, Kecamatan Pekalongan Timur, Kecamatan Pekalongan Selatan, dan Kecamatan Pekalongan Utara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang merupakan lembaga legislatif di tingkat kabupaten/kota diharapkan sebagai wadah aspirasi rakyat yang dapat menghasilkan berbagai keputusan yang membela berbagai kepentingan masyarakat. DPRD Kota Pekalongan terdiri dari beberapa komisi antara lain Komisi A, B, C, dan D yang secara

rutin mengadakan rapat/sidang untuk membahas masalah-masalah yang ada di masyarakat dan dihasilkan suatu keputusan, misalnya keputusan daerah tentang distribusi, transportasi dan lain sebagainya.

Di Kota Pekalongan, pejabat-pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Daerah dan Sekretariat Dewan sebanyak 47 orang, dan di Lembaga Teknis Daerah sebanyak 254 orang merupakan sumber daya manusia yang diharapkan dapat melaksanakan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya dan mampu melayani masyarakat di berbagai sektor.

4. Pembagian Wilayah

Kota Pekalongan terbagi menjadi 4 Kecamatan dengan jumlah Kelurahan RT dan RW sebagai berikut:

Tabel IV.3
Jumlah Kelurahan, RW & RT di Kota Pekalongan

Tahun	Kelurahan	RW	RT
2001	46	272	1243
2002	46	272	1243
2003	46	272	1249
2004	46	271	1249
Jumlah/Total	46	277	1249

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana dalam BPS Kota Pekalongan

5. Kependudukan

Kesejahteraan penduduk merupakan sasaran utama dari pembangunan sebagaimana tertuang dalam GBHN. Pembangunan yang dilaksanakan adalah dalam rangka membentuk manusia Indonesia

seutuhnya. Untuk itu Pemerintah telah melaksanakan berbagai usaha dalam rangka memecahkan berbagai masalah kependudukan. Usaha-usaha yang mengarah pada pemerataan penyebaran penduduk telah dilaksanakan pemerintah dengan cara transmigrasi, sedangkan usaha untuk menekan laju pertumbuhan penduduk telah dilakukan pemerintah dengan Program KB (Keluarga Berencana) yang dimulai awal tahun 1970-an.

Jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2004 adalah 264.932 jiwa, terdiri dari 130.983 laki-laki (49,44%) dan 133.949 perempuan (50,56%). Sedangkan banyaknya rumah tangga adalah 66.092.

Kepadatan penduduk di Kota Pekalongan cenderung meningkat seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Rasio ketergantungan (*Dependency Ratio*) Kota Pekalongan cukup kecil. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk usia 15-64 tahun lebih besar dari penduduk usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas.

6. Tenaga Kerja

Tabel IV.4
Banyaknya Pekerja Menurut Jenis Kelamin
dan Lapangan Pekerjaan Di Kota Pekalongan Tahun 2004

LAPANGAN PEKERJAAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
Pertanian	1017	1480	2497
Pertambangan	0	0	0
Industri	10720	6773	17493
Listrik	135	39	174
Bangunan	709	0	709
Perdagangan	470	807	1277
Angkutan dan Perhubungan	712	230	942

Keuangan	608	279	887
Jasa dan Lainnya	660	145	805
Jumlah	15031	9753	24784
2003	15041	9714	24755
2002	14825	9515	24340
2001	16008	8970	24978

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Pekalongan dalam BPS Kota Pekalongan

7. Transportasi

Panjang jalan di Kota Pekalongan pada tahun 2004 mencapai 130,152 Km. 7,860 Km berada di bawah wewenang Negara, diaspal dan dalam keadaan baik dan sedang. 0, 270 Km di bawah wewenang propinsi, diaspal dan juga dalam keadaan baik dan sedang, serta sisanya di bawah wewenang Kota Pekalongan, sepanjang 115,339 Km, 20,111Km dalam keadaan rusak dan 1,2 Km dalam keadaan rusak berat.

Di Kota Pekalongan ada 2 (dua) jenis kendaraan angkutan darat utama yaitu kendaraan bermotor dan kereta api. Pada tahun 2004 kendaraan bermotor dari berbagai jenis tercatat sebanyak 56.887 unit yang dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu 641 unit milik pemerintah dan 56.246 unit milik pribadi/umum. Jasa angkutan kereta api sangat dibutuhkan masyarakat Pekalongan. Pada tahun 2004 jumlah penumpang kereta api naik 9,99%.

8. Ekonomi

Dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Kota Pekalongan menganut prinsip anggaran berimbang dan dinamis. Berimbang berarti harus diusahakan seimbang antara penerimaan dan pengeluaran, sedangkan prinsip dinamis berarti semakin meningkatnya jumlah anggaran dan tabungan pemerintah, sehingga kemampuan daerah bertambah dalam menghadapi otonomi daerah terutama kemampuan keuangan daerah. Pada tahun 2004, realisasi penerimaan APBD Kota Pekalongan dibanding dengan pengeluarannya menunjukkan posisi positif seperti yang terbaca di tabel IV.5 (surplus sebesar Rp764.449.151).

Tabel IV.5
Realisasi Pendapatan & Belanja APBD
Kota Pekalongan
Tahun 2004

Jenis Pendapatan & Belanja	Jumlah (Rp)
I PENDAPATAN	181.052.920.858
1.1 Pendapatan Asli Daerah PAD	15.864.596.334
1.1.1 Pajak Daerah	5.791.063.409
1.1.2 Retribusi Daerah	4.537.416.358
1.1.3 Pos Laba Perusahaan Milik Daerah	208.221.000
1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah	5.327.895.567
1.2 Dana Perimbangan	158.496.093.919
1.2.1 Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak	15.592.439.313
1.2.2 Dana Alokasi Umum	125.408.000.000
1.2.3 Dana Alokasi Khusus	5.500.000.000
1.2.4 Dana Perimbangan dari Propinsi	11.995.654.606
1.3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah	6.692.230.605
1.3.1 Bantuan Dana Kontingensi dari Pemerintah	6.692.230.605
1.3.2 Dana Darurat	-
II BELANJA	180.288.471.707
2.1 Belanja Administrasi Umum Aparatur Daerah	29.889.894.500
2.1.1 Belanja Pegawai	16.805.716.530
2.1.2 Belanja Barang & Jasa	9.880.247.050
2.1.3 Belanja Perjalanan Dinas	939.112.850
2.1.4 Belanja Pemeliharaan	2.264.818.070

2.2 Belanja Operasional Pemeliharaan Sarana & Prasarana Aparatur Daerah	7.621.146.603
2.2.1 Belanja Pegawai	700.773.500
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa	5.960.648.203
2.2.3 Belanja Perjalanan Dinas	942.249.900
2.2.4 Belanja Pemeliharaan	17.475.000
2.3 Belanja Administrasi Umum Pelayanan Publik	72.603.714.931
2.3.1 Belanja Pegawai	67.107.633.691
2.3.2 Belanja Barang dan Jasa	3.363.483.300
2.3.3 Belanja Perjalanan Dinas	183.880.000
2.3.4 Belanja Pemeliharaan	1.948.717.940
2.4 Belanja Operasional Pemeliharaan Sarana & Prasarana Pelayanan Publik	11.957.623.844
2.4.1 Belanja Pegawai	1.358.800.169
2.4.2 Belanja Barang dan Jasa	8.439.486.325
2.4.3 Belanja Perjalanan Dinas	842.451.100
2.4.4 Belanja Pemeliharaan	1.316.886.250
2.5 Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	15.180.705.784
2.6 Belanja Tak Tersangka	70.025.000
2.7 Belanja Modal / Investasi	42.965.361.045
2.7.1 Belanja Modal Aparatur	4.149.928.285
2.7.2 Belanja Modal Publik	38.815.432.760
III SURPLUS / DEFISIT	764.449.151
IV PEMBIAYAAN (4.1 – 4.2)	11.849.032.050
4.1 Penerimaan Daerah	15.540.917.550
4.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	15.540.917.550
4.1.2 Transfer dari Dana Cadangan	-
4.1.3 Penerimaan dari Obligasi	-
4.1.4 Hasil Penjualan Aset Daerah	-
4.2 Pengeluaran Daerah	3.691.885.500
4.2.1 Transfer ke Dana Cadangan	1.000.000.000
4.2.2 Penyertaan Modal	2.500.000.000
4.2.3 Pembayaran Utang Pokok Yang Jatuh Tempo	191.885.500
4.2.4 Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berjalan	-

Sumber : *Bagian Keuangan Pemkot Pekalongan*

Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan tahun 2003 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan tahun 1993 lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 3,84%. Hal ini terjadi karena sektor pertanian khususnya sub sektor perikanan yang merupakan primadona Kota Pekalongan mengalami kenaikan yang cukup berarti dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan riil secara sektoral tahun 2003 terlihat bervariasi, namun secara umum mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor pertanian. Pertumbuhan riil yang rendah dicapai oleh sektor listrik, gas dan air minum sebesar 2,49%.

Sektor industri pengolahan memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Kota Pekalongan yaitu sebesar 25,07%, sementara sektor keuangan yang diharapkan sebagai penunjang perekonomian memberikan peran 10,31%. Peranan sektor pertanian masih cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi karena mampu memberi andil sebesar 9,03%.

Tabel IV.6
PDRB dan Distribusi % PDRB
Menurut Lapangan Usaha Di Kota Pekalongan
Atas Dasar Harga Konstan 1993

Lapangan Usaha	2002 (Rp.000)	2003 (Rp.000)	Distribusi 2003 (%)
1. Pertanian	41.818.354	43.930.591	9,03
1.1 Tanaman Bahan Makanan	5.334.430	5.260.902	1,08
1.2 Peternakan	4.667.362	5.498.617	1,13
1.3 Perikanan	31.816.562	33.171.072	6,82
2. Pertambangan & Penggalian	0	0	0,00
3. Industri Pengolahan	117.474.570	121.983.486	25,07
3.1 Industri Besar / Sedang	93.643.407	98.491.326	20,24
3.2 Industri Kecil	17.509.638	17.176.965	3,53
3.3 Industri Rumah Tangga	6.321.525	6.315.204	1,30
4. Listrik, Gas & Air Minum	5.845.589	5.990.951	1,23
4.1 Listrik	5.162.589	5.271.473	1,08
4.2 Gas	0	0	0,00
4.3 Air Minum	682.844	719.478	0,15
5. Bangunan	44.709.107	46.801.023	9,62
6. Perdagangan	93.164.897	97.179.216	19,97
6.1 Perdagangan Besar / Eceran	80.697.125	84.861.566	17,44
6.4 Hotel / Losmen	2.682.169	2.721.645	0,56
6.5 Restoran / Rumah Makan	9.785.603	9.596.005	1,97

7. Pengangkutan & Komunikasi	43.393.168	47.679.769	9,80
7.1 Angkutan Kereta Api	2.595.101	2.612.503	0,54
7.2 Angkutan Jalan raya	28.330.430	28.945.141	5,95
7.3 Jasa Penumpang Angkutan	1.299.959	1.408.850	0,29
7.4 Pos & Telekomunikasi	14.167.678	14.713.275	3,02
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	48.384.479	50.084.148	10,31
8.1 Perbankan	22.275.357	23.592.728	4,85
8.2 Lembaga Keuangan Bukan Bank	6.105.422	6.451.707	1,33
8.3 Sewa Bangunan	19.008.831	19.101.227	3,93
8.4 Jasa Perusahaan	994.869	1.038.486	0,21
9. Jasa-jasa	70.810.524	72.826.423	14,97
9.1 Pemerintahan & Hankam	53.011.137	53.926.463	11,08
9.2 Jasa Sosial & Kemasyarakatan	6.537.774	6.853.198	1,41
9.3 Jasa Hiburan & Rekreasi	224.013	228.938	0,05
9.4 Jasa Perorangan & RT	11.037.600	11.817.824	2,43
PDRB	468.600.688	486.575.607	100,00

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data

1. Kabupaten Pekalongan

i. Pendapatan Asli Daerah

Tabel V.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pekalongan
Tahun Anggaran 2001 – 2004

Tahun	PAD (Rp)	Pertumbuhan
2001	14,275,493,381	-
2002	22,278,219,028	56.06%
2003	22,734,767,294	2.05%
2004	27,224,986,021	19.75%
Rata-rata		25.95%

Sumber : Bappeda Kabupaten Pekalongan (Data diolah; 2006)

Berdasarkan data di atas, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pekalongan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 mengalami peningkatan. Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pekalongan adalah 25,95% per tahun.

ii. Total Penerimaan Daerah

Tabel V.2
Total Penerimaan Daerah Kabupaten Pekalongan
Tahun Anggaran 2001 – 2004

Tahun	TPD (Rp)	Pertumbuhan
2001	237,133,890,749	-
2002	247,858,558,010	4.52%
2003	293,063,279,225	18.24%
2004	311,781,791,451	6.39%
Rata-rata		9.72%

Sumber : Bappeda Kabupaten Pekalongan (Data diolah; 2006)

Berdasarkan data di atas, Total Penerimaan Daerah Kabupaten Pekalongan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 mengalami peningkatan. Rata-rata pertumbuhan Total Penerimaan Daerah Kabupaten Pekalongan adalah 9,72% per tahun.

iii. Total Penerimaan Daerah

Tabel V.3
Realisasi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kabupaten Pekalongan
Tahun Anggaran 2001 – 2004

Tahun	BHP (Rp)	Pertumbuhan
2001	10,688,150,377	-
2002	18,110,664,825	69.45%
2003	16,895,539,491	-6.71%
2004	16,862,100,144	-0.20%
Rata-rata		20.85%

Sumber : Bappeda Kabupaten Pekalongan (Data diolah; 2006)

Berdasarkan data di atas, realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kabupaten Pekalongan dari tahun 2001 ke tahun 2002 mengalami peningkatan dan terus mengalami penurunan tahun berikutnya. Rata-rata pertumbuhan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kabupaten Pekalongan adalah 20,85% per tahun.

iv. Sumbangan dan Bantuan

Tabel V.4
Realisasi Sumbangan dan Bantuan Kabupaten Pekalongan
Tahun Anggaran 2001 – 2004

Tahun	Sumbangan Bantuan (Rp)	Pertumbuhan
2001	205,219,044,000	-
2002	207,469,674,157	1.10%
2003	237,243,770,000	14.35%
2004	248,494,968,056	4.74%
Rata-rata		6.73%

Sumber : Bappeda Kabupaten Pekalongan (Data diolah; 2006)

Berdasarkan data di atas, Realisasi penerimaan Sumbangan dan Bantuan Kabupaten Pekalongan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 mengalami peningkatan. Rata-rata pertumbuhan Sumbangan dan Bantuan Kabupaten Pekalongan adalah 6,73% per tahun.

2. Kota Pekalongan

i. Pendapatan Asli Daerah

Tabel V.5
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan
Tahun Anggaran 2001 – 2004

Tahun	PAD (Rp)	Pertumbuhan
2001	7,327,371,343	-
2002	11,629,270,132	58.71%
2003	13,679,201,802	17.63%
2004	15,864,596,334	15.98%
Rata-rata		30.77%

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kota Pekalongan (Data diolah; 2006)

Berdasarkan data di atas, Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 mengalami peningkatan. Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan adalah 30,77% per tahun.

ii. Total Penerimaan Daerah

Tabel V.6
Total Penerimaan Daerah Kota Pekalongan
Tahun Anggaran 2001 –2004

Tahun	TPD (Rp)	Pertumbuhan
2001	193,104,640,941	-
2002	147,587,364,057	-23.57%
2003	172,741,397,221	17.04%
2004	181,052,920,858	4.81%
Rata-rata		-0.57%

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kota Pekalongan (Data dioiah; 2006)

Berdasarkan data di atas, Total Penerimaan Daerah Kota Pekalongan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 cenderung mengalami penurunan. Rata-rata pertumbuhan Total Penerimaan Daerah Kota Pekalongan adalah – 0,57% per tahun.

iii. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

Tabel V.7
Realisasi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kota Pekalongan
Tahun Anggaran 2001 – 2004

Tahun	BHP (Rp)	Pertumbuhan
2001	8,222,797,588	-
2002	16,390,702,272	99.33%
2003	15,269,294,779	-6.84%
2004	15,592,439,313	2.12%
Rata-rata		31.54%

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kota Pekalongan (Data dilolah; 2006)

Berdasarkan data di atas, Realisasi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kota Pekalongan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 berfluktuasi. Terjadi penurunan dari tahun 2002 ke tahun 2003. Rata-rata pertumbuhan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kota Pekalongan adalah 31,54% per tahun.

iv. Sumbangan dan Bantuan

Tabel V.8
Realisasi Sumbangan dan Bantuan Kota Pekalongan
Tahun Anggaran 2001 – 2004

Tahun	Sumbangan Bantuan (Rp)	Pertumbuhan
2001	83,085,993,000	-
2002	102,009,150,000	22.78%
2003	129,379,065,747	26.83%
2004	130,913,000,000	1.19%
Rata-rata		16.93%

Sumber : Bagian Keuangan Setda Kota Pekalongan (Data dilolah; 2006)

Berdasarkan data di atas, Realisasi Sumbangan dan Bantuan Pekalongan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 mengalami peningkatan. Rata-rata pertumbuhan Sumbangan dan Bantuan Kota Pekalongan adalah 16,93% per tahun.



2. Pembahasan

a. Derajat Otonomi Fiskal Daerah

i. Kabupaten Pekalongan

Tabel V.9
Rasio PAD terhadap TPD Kabupaten Pekalongan
Tahun Anggaran 2001 – 2004

Tahun	PAD (Rp)	TPD (Rp)	DOF
2001	14,275,493,381	237,133,890,749	6.02%
2002	22,278,219,028	247,858,558,010	8.99%
2003	22,734,767,294	293,063,279,225	7.76%
2004	27,224,986,021	311.781,791,451	8.73%
Rata-rata			7.87%

Sumber : Data diolah (2006)

Hasil analisis menunjukkan bahwa Derajat Otonomi Fiskal kabupaten Pekalongan dari tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun 2004 berfluktuasi dan cenderung meningkat yang mengindikasikan bahwa sejak dimulainya otonomi daerah Kabupaten Pekalongan semakin mampu membiayai program pembangunannya dengan mengandalkan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan Kategori Kemampuan Keuangan Daerah menurut Hendrik, Kabupaten Pekalongan selama pelaksanaan otonomi daerah masih berada dalam kategori sangat kurang. Hal ini disebabkan proporsi Pendapatan Asli Daerah yang jauh lebih kecil dari Total Penerimaan Daerah. Selanjutnya, Derajat

Otonomi Fiskal Kabupaten Pekalongan digambarkan dalam suatu garis trend dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a) Menentukan a dengan rumus:

$$a = \frac{\sum Y}{N}$$

b) Menentukan b dengan rumus :

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

c) Menentukan persamaan garis trend:

$$Y' = a + bX$$

Dimana:

Y' = trend

Y = Derajat Otonomi Fiskal

X = Nilai variabel independen dalam analisis trend adalah waktu

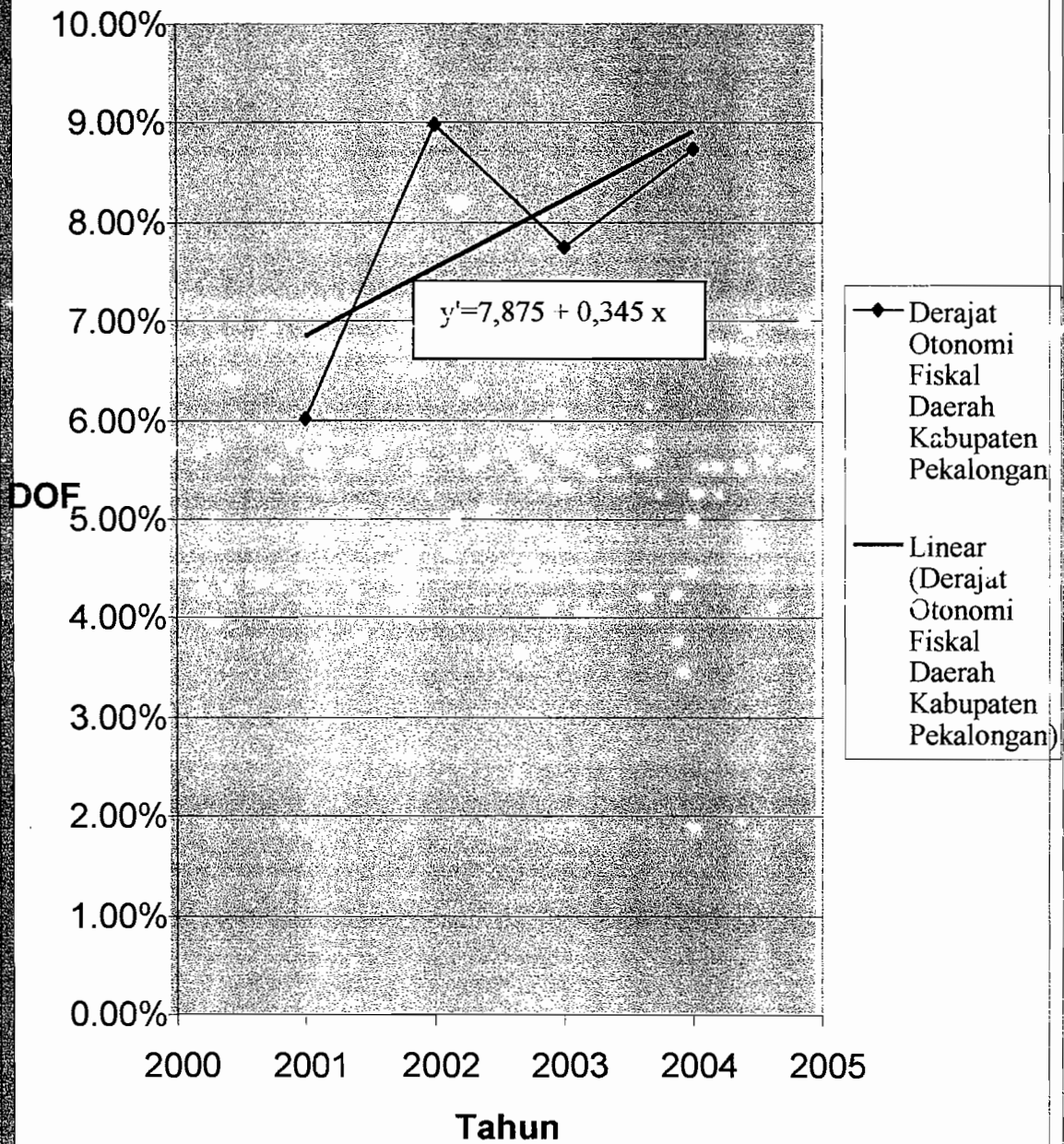
a = konstanta (nilai Y' jika $X = 0$)

b = kemiringan

Bagan V.1 menampilkan hasil perhitungan trend Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten Pekalongan. Persamaan trend Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten Pekalongan adalah: $Y'_{DOF} = 7,875 + 0,345X$. Nilai a atau konstanta sebesar 7,875 yang berarti nilai Derajat Otonomi Fiskal saat $X = 0$ (akhir tahun 2002 atau awal 2003) adalah 7,875%. Persamaan trend Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten Pekalongan memiliki nilai b atau kemiringan sebesar

0,345 yang berarti Derajat Otonomi Fiskal tiap tahunnya meningkat sebesar 0,345%. Meningkatnya Derajat Otonomi Fiskal ini menunjukkan perkembangan kemampuan keuangan Kabupaten Pekalongan yang semakin baik.

Bagan V.1
Trend Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten Pekalongan
Tahun 2001 - 2004



Tabel V.10
Rasio BHP terhadap TPD Kabupaten Pekalongan
Tahun Anggaran 2001 – 2004

Tahun	BHP(Rp)	TPD (Rp)	DOP
2001	10,688,150,377	237,133,890,749	4.51%
2002	18,110,664,825	247,858,558,010	7.31%
2003	16,895,539,491	293,063,279,225	5.77%
2004	16,862,100,144	311,781,791,451	5.41%
Rata-rata			5.75%

Sumber : Data diolah (2006)

Hasil analisis menunjukkan bahwa Derajat Otonomi Perpajakan Kabupaten Pekalongan dari tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun 2004 berfluktuasi dengan rata-rata Derajat Otonomi Perpajakan sebesar 5,75% per tahun yang menunjukkan peranan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dalam otonomi fiskal di Kabupaten Pekalongan masih rendah. Selanjutnya, Derajat Otonomi Perpajakan Kabupaten Pekalongan digambarkan dalam suatu garis trend dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a) Menentukan a dengan rumus:

$$a = \sum Y/N$$

b) Menentukan b dengan rumus :

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

c) Menentukan persamaan garis trend:

$$Y' = a + bX$$

Dimana:

Y' = trend

Y = Derajat Otonomi Perpajakan

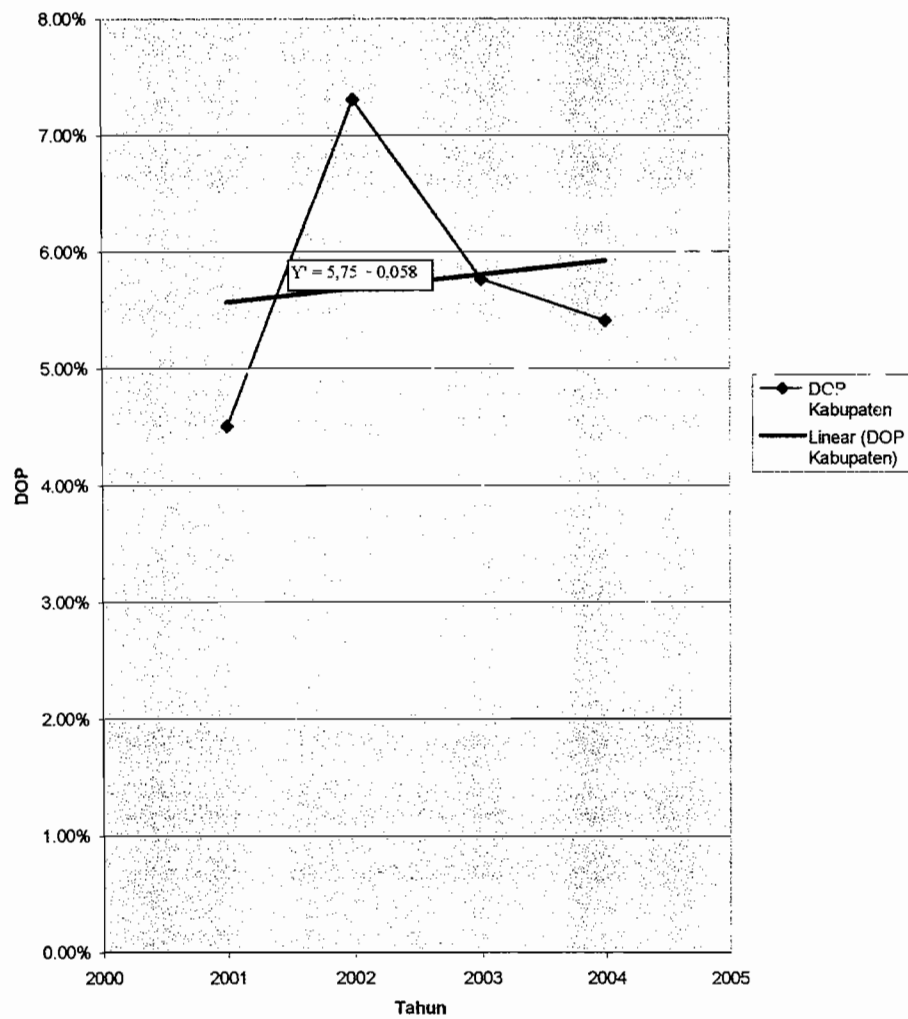
X = Nilai variabel independen dalam analisis trend adalah waktu

a = konstanta (nilai Y' jika X = 0)

b = kemiringan

Bagan V.2 menampilkan Trend Derajat Otonomi Perpajakan dengan persamaan trend: $Y'_{DOP} = 5,75 + 0,058X$. Nilai a atau konstanta sebesar 5,75 yang berarti nilai Derajat Otonomi Perpajakan saat X = 0 (akhir tahun 2002 atau awal 2003) adalah 5,75%. Persamaan trend Derajat Otonomi Perpajakan Kabupaten Pekalongan memiliki nilai b atau kemiringan sebesar 0,058 yang berarti Derajat Otonomi Perpajakan tiap tahunnya meningkat sebesar 0,058%. Meningkatnya Derajat Otonomi Perpajakan ini menunjukkan perkembangan kemampuan keuangan Kabupaten Pekalongan yang semakin baik karena Kabupaten Pekalongan semakin mampu mengoptimalkan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dalam membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahnya.

Bagan V.2
Trend Derajat Otonomi Perpajakan
Kabupaten Pekalongan
Tahun 2001 - 2004



Tabel V.11
Rasio Sumbangan Bantuan terhadap TPD
Kabupaten Pekalongan
Tahun Anggaran 2001 – 2004

Tahun	BHP/BP(Rp)	TPD (Rp)	DOB
2001	205,219,044,000	237,133,890,749	86.54%
2002	207,469,674,157	247,858,558,010	83.70%
2003	237,243,770,000	293,063,279,225	80.95%
2004	248,494,968,056	311,781,791,451	79.70%
Rata-rata			82.73%

Sumber : Data diolah (2006)

Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio Sumbangan dan Bantuan terhadap Total Penerimaan Daerah Kabupaten Pekalongan dari tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun 2004 cenderung mengalami penurunan dengan rata-rata Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan sebesar 82,73% per tahun yang menunjukkan bahwa peranan Sumbangan dan Bantuan terhadap Total Penerimaan Daerah Kota Pekalongan sangat tinggi atau dengan kata lain tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih masih tinggi walaupun tiap tahunnya mengalami penurunan.

Selanjutnya, Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan Kabupaten Pekalongan digambarkan dalam suatu garis trend dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a) Menentukan a dengan rumus:

$$a = \sum Y/N$$

b) Menentukan b dengan rumus :

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

c) Menentukan persamaan garis trend:

$$Y' = a + bX$$

Dimana:

Y' = trend

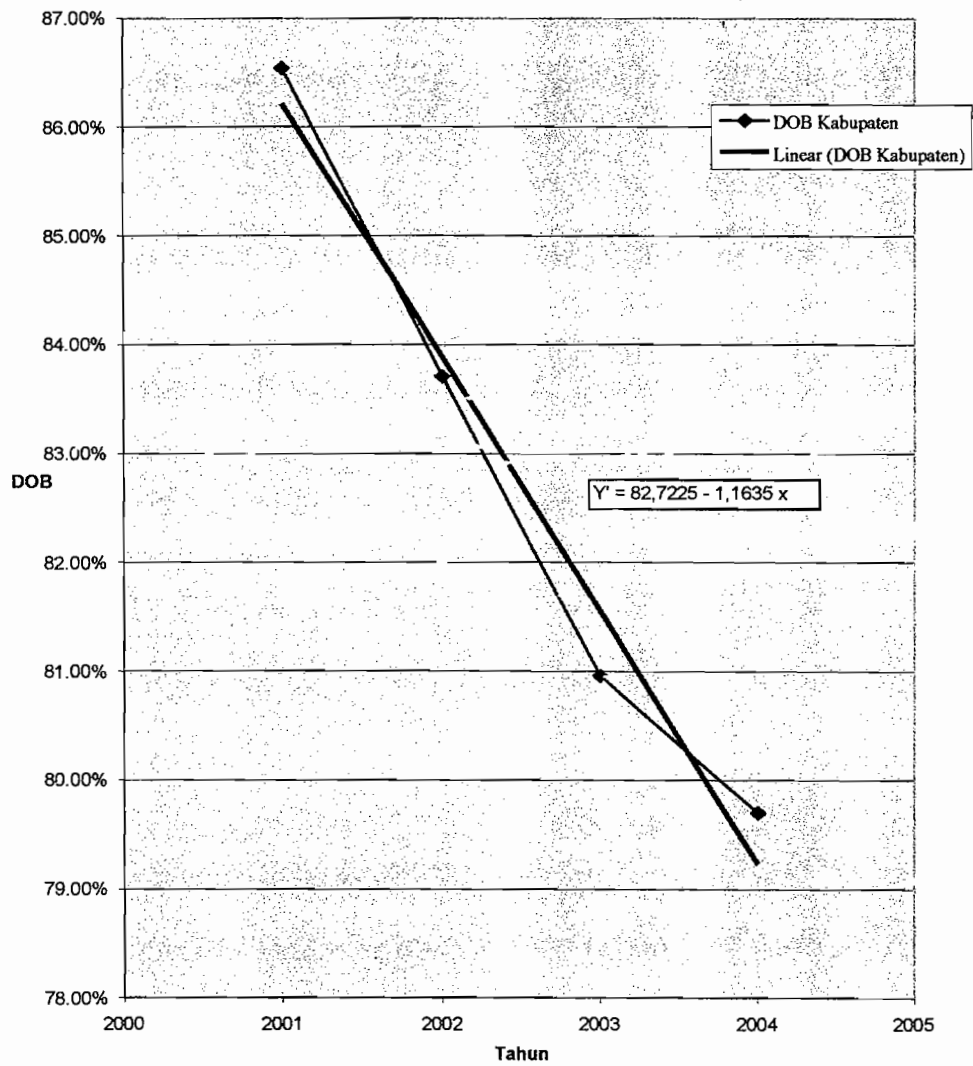
Y = Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan

X = Nilai variabel independen dalam analisis trend adalah waktu

a = konstanta (nilai Y' jika $X = 0$)

b = kemiringan

Bagan V.3
Trend Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan
Kabupaten Pekalongan
Tahun 2001 - 2004



Bagan V.3 menunjukkan Trend Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan Kabupaten Pekalongan dengan persamaan trend: $Y_{DOB} = 82,7225 - 1,1635X$. Nilai a atau konstanta sebesar 82,7225 yang berarti nilai Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan Kabupaten Pekalongan saat $X = 0$ (akhir tahun 2002 atau awal 2003) adalah 82,7225%. Persamaan trend Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan Kabupaten Pekalongan memiliki nilai b atau kemiringan sebesar $- 1,1635$ yang berarti Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan Kabupaten Pekalongan tiap tahunnya menurun sebesar 1,1635%. Menurunnya Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan Kabupaten Pekalongan menunjukkan perkembangan kemampuan keuangan Kabupaten Pekalongan yang makin meningkat karena Kabupaten Pekalongan semakin mampu mengurangi ketergantungan terhadap sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat.

ii. Kota Pekalongan

Alat analisis yang digunakan untuk menentukan derajat otonomi fiskal adalah dengan rumus sebagai berikut:

$$a) \text{ DOF} = \frac{\text{PAD}}{\text{TPD}} \times 100 \%$$

Berikut ini ditampilkan tabel hasil perhitungan Derajat Otonomi Fiskal yang membandingkan Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah:

Tabel V.12
Rasio PAD terhadap TPD Kota Pekalongan
Tahun Anggaran 2001 – 2004

Tahun	PAD (Rp)	TPD (Rp)	DOF
2001	7,327,371,343	193,104,640,941	3.79%
2002	11,629,270,132	147,587,364,057	7.88%
2003	13,679,201,802	172,741,397,221	7.92%
2004	15,864,596,334	181,052,920,858	8.76%
Rata-rata			7.09%

Sumber : Data diolah (2006)

Hasil analisis menunjukkan bahwa Derajat Otonomi Fiskal kota Pekalongan dari tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun 2004 semakin meningkat yang mengindikasikan bahwa sejak dimulainya otonomi daerah kota Pekalongan semakin mampu membiayai program pembangunannya dengan mengandalkan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah. Dilihat dari tabel V.9, perkembangan kemampuan keuangan Kota Pekalongan semakin meningkat yang ditunjukkan dengan peningkatan Derajat Otonomi Fiskal. Selama pelaksanaan otonomi, Kota Pekalongan semakin

mampu dalam pembiayaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan Kategori Kemampuan Keuangan Daerah menurut Hendrik, Kota Pekalongan selama pelaksanaan otonomi daerah masih berada dalam kategori sangat kurang. Hal ini disebabkan proporsi Pendapatan Asli Daerah yang jauh lebih kecil dari Total Penerimaan Daerah.

Selanjutnya, Derajat Otonomi Fiskal Kota Pekalongan digambarkan dalam suatu garis trend dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a) Menentukan a dengan rumus:

$$a = \frac{\sum Y}{N}$$

b) Menentukan b dengan rumus :

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

c) Menentukan persamaan garis trend:

$$Y' = a + bX$$

Dimana:

Y' = trend

Y = Derajat Otonomi Fiskal

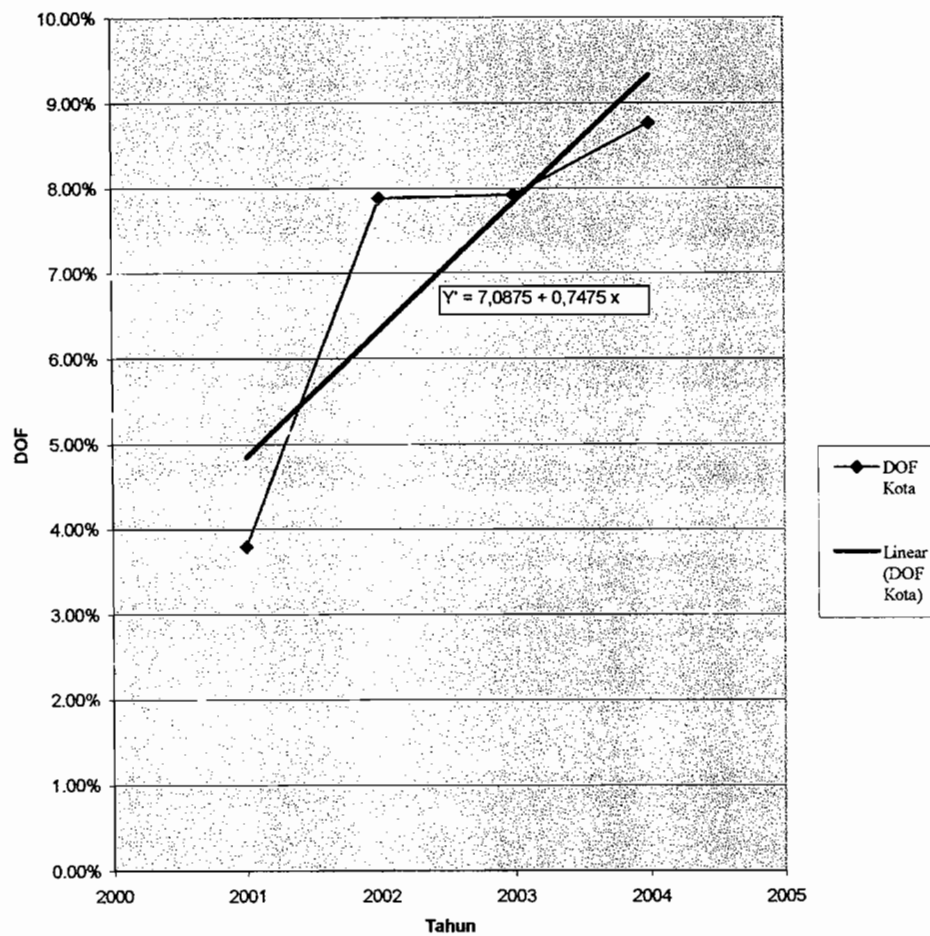
X = Nilai variabel independen dalam analisis trend adalah

waktu

a = konstanta (nilai Y' jika $X = 0$)

b = kemiringan

Bagan V.4
Trend Derajat Otonomi Fiskal Kota Pekalongan
Tahun 2001 - 2004



Persamaan trend Derajat Otonomi Fiskal Kota Pekalongan adalah: $Y'_{DOF} = 7,0875 + 0,7475X$. Nilai a atau konstanta sebesar

7,0875 yang berarti nilai Derajat Otonomi Fiskal saat $X = 0$ (akhir tahun 2002 atau awal 2003) adalah 7,0875%. Persamaan trend Derajat otonomi Fiskal kota Pekalongan memiliki nilai b atau kemiringan sebesar 0,7475 yang berarti Derajat Otonomi Fiskal tiap tahunnya meningkat sebesar 0,7475%. Meningkatnya Derajat Otonomi Fiskal ini menunjukkan perkembangan kemampuan keuangan Kota Pekalongan yang semakin baik.

$$b) \text{ DOP} = \frac{\text{BHP}}{\text{TPD}} \times 100 \%$$

Pada table V.10 ditampilkan tabel hasil perhitungan Derajat Otonomi Perpajakan yang membandingkan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap Total Penerimaan Daerah :

Tabel V.13
Rasio BHP terhadap TPD Kota Pekalongan
Tahun Anggaran 2001 – 2004

Tahun	BHP(Rp)	TPD (Rp)	DOP
2001	8,222,797,588	237,133,890,749	3.47%
2002	16,390,702,272	247,858,558,010	6.61%
2003	15,269,294,779	293,063,279,225	5.21%
2004	15,592,439,313	311,781,791,451	5.00%
Rata-rata			5.07%

Sumber : Data diolah (2006)

Hasil analisis menunjukkan bahwa Derajat Otonomi Perpajakan Kota Pekalongan dari tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun 2004 berfluktuasi. Rata-rata Derajat Otonomi

Perpajakan dari tahun 2001 sampai tahun 2004 sebesar 5,07% per tahun yang menunjukkan peranan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dalam otonomi fiskal di kota Pekalongan masih rendah. Selanjutnya, Derajat Otonomi Perpajakan Kota Pekalongan digambarkan dalam suatu garis trend dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a) Menentukan a dengan rumus:

$$a = \sum Y/N$$

b) Menentukan b dengan rumus :

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

c) Menentukan persamaan garis trend:

$$Y' = a + bX$$

Dimana:

Y' = trend

Y = Derajat Otonomi Perpajakan

X = Nilai variabel independen dalam analisis trend adalah waktu

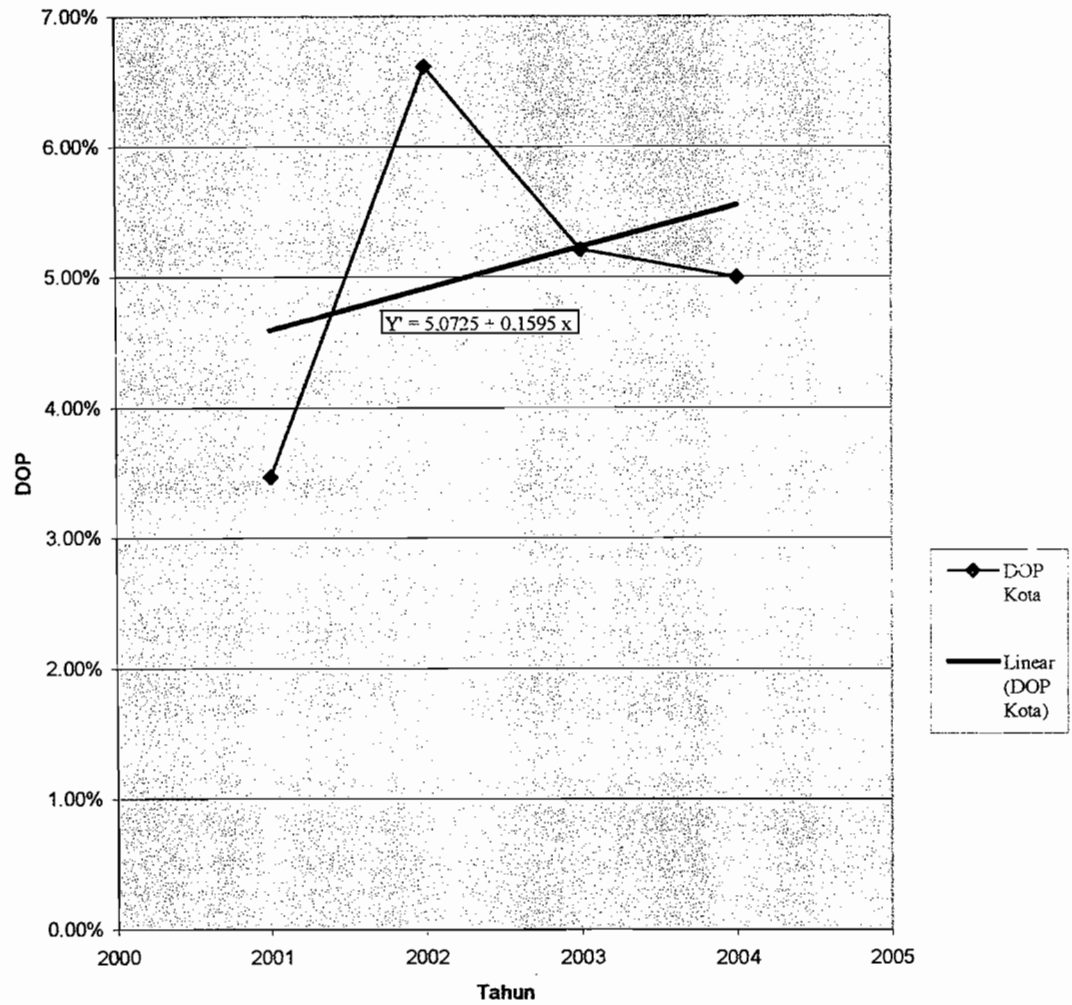
a = konstanta (nilai Y' jika $X = 0$)

b = kemiringan

Bagan V.5 menampilkan Trend Derajat Otonomi Perpajakan dengan persamaan trend: $Y'_{DOP} = 5,0725 + 0,1595X$. Nilai a atau konstanta sebesar 5,0725 yang berarti nilai Derajat

Otonomi Perpajakan saat $X = 0$ (akhir tahun 2002 atau awal 2003) adalah 5,0725%. Persamaan trend Derajat Otonomi Perpajakan kota Pekalongan memiliki nilai b atau kemiringan sebesar 0,1595 yang berarti Derajat Otonomi Perpajakan tiap tahunnya meningkat sebesar 0,1595%. Meningkatnya Derajat Otonomi Perpajakan ini menunjukkan perkembangan kemampuan keuangan Kota Pekalongan yang semakin baik karena daerah tersebut semakin mampu mengoptimalkan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dalam membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahnya.

Bagan V.5
Trend Derajat Otonomi Perpajakan Kota Pekalongan
Tahun 2001 - 2004



$$c) \text{ DOB} = \frac{B}{\text{TPD}} \times 100\%$$

Tabel V.14
Rasio Sumbangan Bantuan terhadap TPD
Kota Pekalongan
Tahun Anggaran 2001 – 2004

Tahun	B(Rp)	TPD (Rp)	DOB
2001	83,085,993,000	237,133,890,749	35.04%
2002	102,009,150,000	247,858,558,010	41.16%
2003	129,379,065,747	293,063,279,225	44.15%
2004	130,913,000,000	311,781,791,451	41.99%
Rata-rata			40.58%

Sumber : Data diolah (2006)

Hasil analisis menunjukkan bahwa Rasio Sumbangan dan Bantuan terhadap Total Penerimaan Daerah Kota Pekalongan dari tahun anggaran 2001 sampai dengan tahun 2004 cenderung meningkat dengan rata-rata Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan sebesar 40,58% per tahun yang menunjukkan bahwa peranan Sumbangan dan Bantuan terhadap Total Penerimaan Daerah Kota Pekalongan cukup tinggi atau dengan kata lain tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi. Selanjutnya, Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan Kota Pekalongan digambarkan dalam suatu garis trend dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a) Menentukan a dengan rumus:

$$a = \sum Y/N$$

b) Menentukan b dengan rumus :

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

c) Menentukan persamaan garis trend:

$$Y' = a + bX$$

Dimana:

Y' = trend

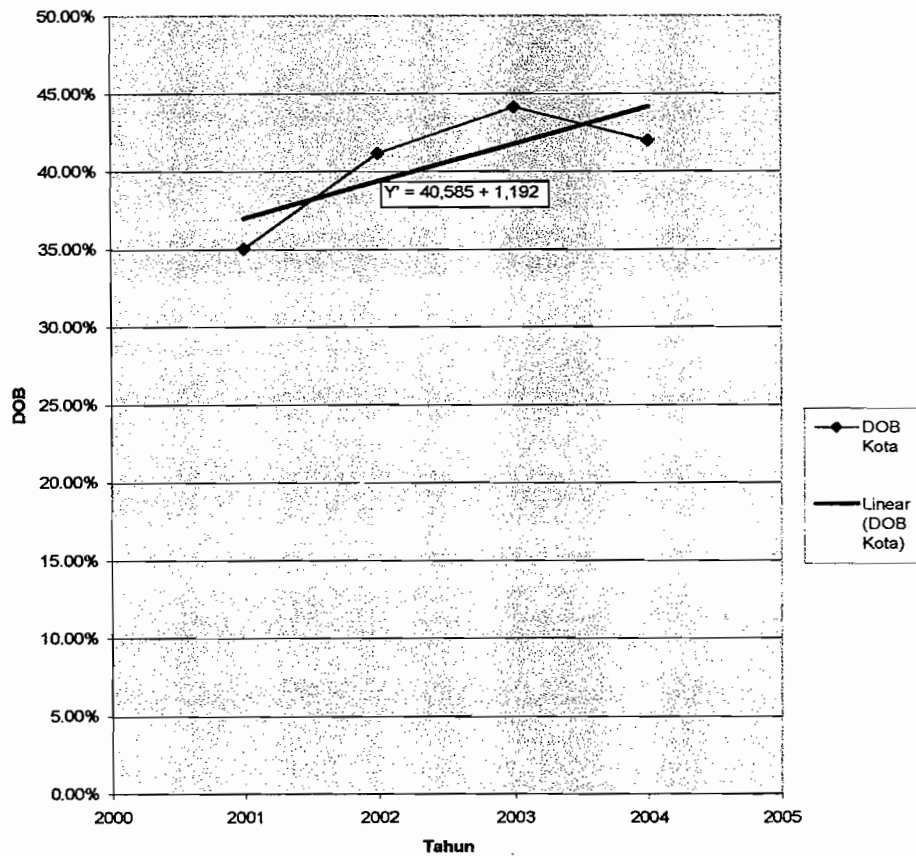
Y = Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan

X = Nilai variabel independen dalam analisis trend adalah waktu

a = konstanta (nilai Y' jika $X = 0$)

b = kemiringan

Bagan V.6
Trend Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan Kota Pekalongan
Tahun 2001 - 2004



Bagan V.6 menampilkan Trend Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan dengan persamaan trend: $Y'_{\text{DOB}} = 40,585 + 1,192X$. Nilai a atau konstanta sebesar 40,585 yang berarti nilai Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan saat $X = 0$ (akhir tahun

2002 atau awal 2003) adalah 40,585%. Persamaan trend Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan Kota Pekalongan memiliki nilai b atau kemiringan sebesar 1,192 yang berarti Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan tiap tahunnya meningkat sebesar 1,192%. Meningkatnya Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan ini menunjukkan perkembangan kemampuan keuangan Kota Pekalongan yang menurun karena daerah tersebut semakin bergantung pada Sumbangan dan Bantuan dari pemerintah pusat.

b. Potensi Daerah

i. Kabupaten Pekalongan

Kabupaten Pekalongan sedang menjalani transformasi dari daerah pertanian ke arah wilayah industri dan segala yang terkait dengannya. Proses itu disadari atau tidak merupakan implikasi berkembang pesatnya industri di Kota pekalongan dan Tegal serta di wilayah lainnya. Dukungan infrastruktur yang baik, seperti jalur Pantura dan sarana telekomunikasi, menjadikan percepatan pertumbuhan tersebut semakin kuat. Konsekuensinya, upaya meningkatkan daya saing dalam berbagai tingkatan harus selalu dilakukan secara sistematis. Peningkatan kualitas kerja dan produk sesuai tuntutan konsumen menjadi sangat penting untuk diperhatikan.

Kabupaten Pekalongan memiliki kebun teh yang luas. Di daerah ini pula terdapat pabrik pengolahan awal teh, yang selanjutnya dibawa

ke berbagai pabrik untuk pengolahan akhir, hingga menjadi teh yang bisa dikonsumsi. Produk, selain teh seperti gula dan padi, dari kabupaten ini akan menghadapi saingan berat dari berbagai kabupaten di sekitar Pekalongan. Karena itu, Kabupaten Pekalongan sebaiknya melakukan spesialisasi pada perkebunan teh berikut sarana pendukungnya, termasuk pabrik. Dengan demikian, daya saing dan daya jual produk daerah ini meningkat.

Industri lain yang layak mendapatkan perhatian adalah industri gula. Kabupaten Pekalongan memiliki pabrik pengolahan tebu menjadi gula. Pabrik tetap layak dipertahankan walaupun berbagai permasalahan gula nasional masih menjadi persoalan besar. Namun, kebutuhan gula nasional atau lokal tetap besar, dan pabrik ini selalu bisa berperan dalam pemenuhan kebutuhan itu. Hasil pertanian daerah ini merupakan hasil yang mampu untuk dikonsumsi langsung. Hasil pertanian dan perkebunan untuk konsumsi tidak langsung (kecenderungan konsumsi tidak langsung) terlihat tidak terlalu besar. Dengan demikian, bagi kawasan ini pengembangan industri dengan bahan baku yang demikian akan relatif sulit dalam skala besar. Jalan keluarnya, hasil pertanian bisa dimanfaatkan untuk konsumsi langsung di sekitar daerah, atau Pekalongan dapat bekerja sama dengan daerah lain melalui perdagangan antar daerah.

Industri yang identik dengan Pekalongan adalah Batik Pekalongan. Batik ini merupakan potensi khas yang memiliki nilai jual

tinggi. Tentu saja, pengembangan segala jenis batik tetap harus dilakukan agar keinginan konsumen terhadap selera batik bisa dipenuhi. Di samping itu, industri tekstil lain juga berkembang pesat. Industri di wilayah ini mendapatkan dukungan dari berbagai infrastruktur yang telah ada dan terselenggara baik.

Bagi para investor, industri tekstil, teh dan industri gula dalam batas tertentu merupakan industri yang layak bagi penanaman investasi. Ekspor tekstil berupa batik Pekalongan memiliki nilai yang cukup menggembirakan. Infrastruktur industri telah tercipta dengan baik. Pemda tampaknya memberikan situasi yang kondusif bagi penanaman investasi tersebut. Keunggulan potensi pada industri tekstil didukung oleh posisi Kabupaten Pekalongan dalam jalur pantai utara, sehingga akan memudahkan dalam distribusi dan transportasi.

ii. Kota Pekalongan

Potensi terbesar kota Pekalongan berasal dari industri tekstil dan yang terkait dengannya, seperti sarung palekat, garmen, kain sarung, dan kain batik. Potensi besar lainnya adalah potensi kelautan yang bisa diolah menjadi berbagai produk, terutama ikan. Daerah pantai Pekalongan tidak jauh dari daerah pelabuhan Kota Tegal. Posisi tersebut menguntungkan bagi Pekalongan, asalkan dikembangkan semacam kerja sama yang baik antar berbagai daerah yang berdekatan.



Pelabuhan laut Pekalongan merupakan potensi sarana transportasi yang baik untuk perhubungan laut tingkat nasional bahkan internasional.

Potensi kelautan di Kota Pekalongan tidak hanya sekedar ikan dan transportasi, melainkan berbagai produk pengolahan air laut. Di samping ikan dan sejenisnya, air laut juga bisa diolah untuk berbagai keperluan, seperti garam (NaCl) yang kemudian bisa diproses menjadi soda api (NaOH), *Chloor* (Cl_2), *Hydrogen*, *Soda Ash* (Na_2CO_3), senyawa-senyawa *chlorat* dan *per chlorat*, *na-metal*, soda kue, dan seterusnya untuk berbagai keperluan bahan industri dan bahan kimia. Selain garam, air laut juga bisa diproses menjadi *gypsum* yang menghasilkan bahan kedokteran, dehidrat/pengering, batu tahu dan kerajinan patung. Ada lagi yang menyerupai garam, yaitu *salat bittern* yang bisa dikembangkan menjadi senyawa-senyawa magnesium, senyawa-senyawa kalium, *food additives*, *fine chemical*, kosmetik, isolator panas, *catalyst*, dan sebagainya (BPS Kota Pekalongan; 2004).

Daerah ini potensial untuk mengembangkan berbagai jenis industri. Apalagi, kota ini terletak di jalur jalan raya pantai utara yang sangat vital bagi transportasi bisnis dari berbagai kota ke Kota Jakarta, Surabaya, serta kota-kota lainnya di Jawa. Industri yang sekarang ada di Kota Pekalongan layak dikembangkan dalam skala yang lebih besar dan berkualitas. Peningkatan SDM dengan sendirinya mutlak diperlukan. Dukungan untuk itu sudah memadai dengan adanya berbagai lembaga pendidikan yang ada di sekitarnya.

Dengan demikian, potensi investasi di kota ini yang paling besar adalah industri tekstil dan perikanan. Dukungan infrastruktur seperti transportasi dan komunikasi relatif mapan untuk kepentingan investasi dan bisnis. Dua komoditi tersebut memiliki peluang bisnis yang baik untuk menghasilkan keuntungan besar di masa mendatang. Sebagai contoh kecil, batik Pekalongan telah mampu menembus ekspor dan pasar lokal di seluruh Indonesia.

c. Sektor Unggulan

Sektor unggulan diidentifikasi dengan rumus :

$$LQ = \frac{PDRB_{ik} / TPDRB_k}{PDRB_{ip} / TPDRB_p}$$

Dimana :

LQ = Koefisien *Location Quotient* Kabupaten/Kota

$PDRB_{ik}$ = Produk Domestik Regional Bruto sektor/subsektor i di Kabupaten/Kota

$TPDRB_k$ = Total Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota

$PDRB_{ip}$ = Produk Domestik Regional Bruto sektor/subsektor i di Propinsi

$TPDRB_p$ = Total Produk Domestik Regional Bruto di Propinsi

Tabel V.15
Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan 1993
Kabupaten Pekalongan
Tahun 2001 – 2003 (Ribuan Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2001	2002	2003
1	Pertanian	147,523,401	154,879,628	163,015,120
2	Pertambangan dan Penggalian	7,221,518	7,438,292	7,756,686
3	Industri Pengolahan	288,468,401	296,370,663	303,090,787
4	Listrik, Gas, dan Air Minum	8,476,424	8,902,436	9,253,994
5	Bangunan	42,124,498	43,135,612	44,300,336
6	Perdagangan	191,195,017	196,791,934	203,334,627
7	Pengangkutan dan Komunikasi	41,071,628	43,860,809	46,666,133
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	47,745,284	50,490,456	52,988,022
9	Jasa-jasa	125,720,234	127,589,196	132,212,367
	TOTAL	899,546,405	929,459,026	962,618,072

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan

Tabel V.16
Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan 1993
Kota Pekalongan
Tahun 2001 – 2003 (Ribuan Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2001	2002	2003
1	Pertanian	45,418,960	41,818,354	43,930,591
2	Pertambangan dan Penggalian	0	0	0
3	Industri Pengolahan	113,112,178	117,474,570	121,983,486
4	Listrik, Gas, dan Air Minum	5,293,910	5,845,589	5,990,951
5	Bangunan	41,913,544	44,709,107	46,801,023
6	Perdagangan	92,113,433	93,164,897	97,179,216
7	Pengangkutan dan Komunikasi	43,470,754	46,393,168	47,479,769
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	44,882,832	48,384,479	50,184,148
9	Jasa-jasa	67,132,758	70,810,524	72,826,426
	TOTAL	453,338,369	468,600,688	486,375,610

Sumber : BPS Kota Pekalongan

Tabel V.17
Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan 1993
Propinsi Jawa Tengah
Tahun 2001 – 2003 (Jutaan Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2001	2002	2003
1	Pertanian	8,598,967.98	8,667,627.13	8,593,295.01
2	Pertambangan dan Penggalian	642,027.09	667,593.55	703,109.51
3	Industri Pengolahan	12,819,594.90	13,374,259.62	14,210,959.35
4	Listrik, Gas, dan Air Minum	509,108.39	564,173.77	574,766.33
5	Bangunan	1,693,045.33	1,767,960.23	1,837,807.02
6	Perdagangan	10,092,087.90	10,459,420.57	11,088,351.92
7	Pengangkutan dan Komunikasi	2,219,896.60	2,339,634.18	2,487,687.39
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1,622,747.76	1,674,959.71	1,723,100.52
9	Jasa-jasa	4,107,700.47	4,260,064.32	4,338,031.40
	TOTAL	42,305,176.42	43,775,693.08	45,557,108.45

Sumber : BPS Kota Pekalongan

Hasil perhitungan LQ disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel V.18
Hasil Perhitungan LQ Kabupaten Pekalongan
Tahun 2001 – 2003

No	Lapangan Usaha	LQ PER TAHUN		
		2001	2002	2003
1	Pertanian	0.806834616	0.841582814	0.897780787
2	Pertambangan dan Penggalian	0.528987102	0.524763805	0.522102027
3	Industri Pengolahan	1.058263662	1.043682121	1.009372524
4	Listrik, Gas, dan Air Minum	3.891297387	3.601022666	3.647689319
5	Bangunan	1.170135325	1.149122304	1.140799322
6	Perdagangan	5.311019811	5.242489678	5.236168066
7	Pengangkutan dan Komunikasi	0.870119917	0.882940549	0.88778571
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1.383723768	1.419736376	1.455355981
9	Jasa-jasa	1.439382941	1.410589108	1.442386104

Sumber : Data diolah (2006)

Tabel V.19
Hasil Perhitungan LQ Kota Pekalongan
Tahun 2001 – 2003

No	Lapangan Usaha	LQ PER TAHUN		
		2001	2002	2003
1	Pertanian	0.492903482	0.450709615	0.478841395
2	Pertambangan dan Penggalian	0	0	0
3	Industri Pengolahan	0.823390963	0.820548439	0.804011028
4	Listrik, Gas, dan Air Minum	0.970369935	0.967933443	0.976312413
5	Bangunan	2.310238572	2.362400974	2.385282395
6	Perdagangan	0.851751636	0.002397373	0.002263138
7	Pengangkutan dan Komunikasi	1.827407739	1.852406009	1.787710353
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	2.581072873	2.698558349	2.727974489
9	Jasa-jasa	1.525129616	1.552786551	1.572463845

Sumber : Data diolah (2006)

Dari sembilan sektor ekonomi yang terdapat di Kabupaten Pekalongan, terdapat 6 sektor yang mempunyai LQ lebih dari satu, yaitu :

1. Sektor Industri Pengolahan yang terdiri dari:
 - a. Makanan, Minuman dan Tembakau
 - b. Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki
 - c. Barang dari Kayu dan Hasil Hutan Lainnya
 - d. Kertas dan Barang Cetakan
 - e. Pupuk, Kimia dan Barang dari karet
 - f. Semen dan Barang Lain bukan Logam
 - g. Logam dasar Besi dan Baja
 - h. Alat Angkutan, Mesin dan Peralatan
 - i. Barang lainnya
2. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih yang terdiri dari:
 - a. Listrik

- b. Air Minum
3. Sektor Bangunan
 4. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yang terdiri dari:
 - a. Perdagangan Besar dan Eceran
 - b. Restoran
 - c. Hotel
 5. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
 - a. Perbankan
 - b. Lembaga Keuangan bukan Bank
 - c. Sewa Bangunan
 - d. Jasa Perusahaan
 6. Sektor Jasa-jasa yang terdiri dari:
 - a. Pemerintahan Umum
 - b. Swasta
 - c. Sosial Kemasyarakatan
 - d. Hiburan dan Rekreasi
 - e. Perorangan dan Rumah Tangga

Potensi yang terdapat di Kabupaten Pekalongan adalah industri Tekstil, Gula dan Teh (Industri Pengolahan). Potensi daerah tersebut sudah menjadi sektor unggulan berdasarkan hasil perhitungan LQ dengan nilai LQ lebih dari 1.

Dari sembilan sektor ekonomi yang terdapat di Kota Pekalongan, terdapat 4 sektor yang mempunyai LQ lebih dari satu, yaitu :

1. Sektor Bangunan
2. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi yang terdiri dari:
 - a. Angkutan Kereta Api
 - b. Angkutan Jalan Raya
 - c. Jasa Penunjang Angkutan
 - d. Pos dan Telekomunikasi
3. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan yang terdiri dari:
 - a. Perbankan
 - b. Lembaga Keuangan bukan Bank
 - c. Sewa Bangunan
 - d. Jasa Perusahaan
4. Sektor Jasa-jasa yang terdiri dari:
 - a. Pemerintahan dan Hankam
 - b. Jasa Sosial dan kemasyarakatan
 - c. Jasa Hiburan dan Rekreasi
 - d. Jasa Perorangan dan Rumah Tangga

Dari hasil perhitungan LQ di atas, hasilnya berbeda dengan potensi yang telah diuraikan. Potensi unggulan di Kota Pekalongan adalah industri tekstil (Industri Pengolahan) dan perikanan (Sektor Pertanian) sedangkan menurut hasil perhitungan LQ sektor unggulan yang diperoleh adalah ke-4 sektor di atas. Nilai

LQ dari sektor industri berada di antara 0 dan 1 yang berarti sektor industri layak untuk dikembangkan lebih lanjut hingga menjadi sektor unggulan.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

I. Kabupaten Pekalongan

a. Perkembangan kemampuan keuangan Kabupaten Pekalongan tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 semakin baik. Hal ini ditunjukkan dengan:

1. Derajat Otonomi Fiskal yang semakin tinggi, namun Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten Pekalongan masih berada dalam kategori sangat kurang.
2. Derajat Otonomi Perpajakan Kabupaten Pekalongan tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 semakin baik yang berarti kemampuan keuangan Kabupaten Pekalongan semakin baik.
3. Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan Kabupaten Pekalongan tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 mengalami penurunan yang berarti kemampuan keuangan Kabupaten Pekalongan semakin baik.

b. Potensi daerah Kabupaten Pekalongan sudah menjadi sektor unggulan.

II. Kota Pekalongan

a. Perkembangan kemampuan keuangan Kota Pekalongan tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 semakin baik. Hal ini ditunjukkan dengan:

1. Derajat Otonomi Fiskal yang semakin tinggi, namun Derajat Otonomi Fiskal Kota Pekalongan masih berada dalam kategori sangat kurang.
 2. Derajat Otonomi Perpajakan Kota Pekalongan tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 semakin baik yang berarti kemampuan keuangan Kota Pekalongan semakin baik.
 3. Derajat Otonomi Sumbangan dan Bantuan Kota Pekalongan tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 semakin meningkat yang berarti kemampuan keuangan Kota Pekalongan berkurang.
- b. Potensi daerah Kota Pekalongan belum menjadi sektor unggulan.

B. SARAN

- I. Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota Pekalongan dapat menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang berpotensi memberi tambahan pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah. Pos terkecil dari sumber Pendapatan Asli Daerah Kota dan Kabupaten Pekalongan berasal dari penerimaan Laba Badan Umum Milik Daerah. Pemerintah Kota dan Kabupaten diharapkan dapat meningkatkan pos penerimaan laba Badan Usaha Milik Daerah untuk dapat memberi tambahan pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah.
- II. Potensi industri tekstil batik Kabupaten dan Kota Pekalongan dapat dioptimalkan dengan terus meningkatkan ekspor batik dan semakin memvariasi motif dan macam batik yang diproduksi.

III. Potensi kelautan yang belum menjadi sektor unggulan layak mendapatkan perhatian khusus pemerintah daerah Kota Pekalongan karena potensi ini mampu menghasilkan output kelautan yang dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian Kota Pekalongan sehingga potensi ini bisa menjadi sektor unggulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta:BPFE.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Depdagri RI dan Fisipol UGM. (1991). *Pengukuran Kemampuan Keuangan Dati II dalam Rangka Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab*. Jakarta.
- Blakley, E.J.(1994). *Planning Local Economic Development*. SAGE Publication Second Edition.
- Halim, Abdul. (2004). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta:AMP YKPN.
- Hendrik, M.Y. (2000). Kesiapan Mimika Menjadi Daerah Otonom. *Tesis S-2*. Program Pasca Sarjana UGM.
- Ismanthono, Henricus W. (2003). *Kamus Istilah Ekonomi Populer*. Edisi Pertama. Jakarta:Cides.
- Koswara. (1999). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia: Suatu Studi Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. *Disertasi S-3*. UGM. Yogyakarta. (Naskah tidak dipublikasikan).
- Kuncoro, Mudrajad. (1995). "Desentralisasi Fiskal di Indonesia : Dilema Otonomi dan Ketergantungan". *Prisma*. No.4,3-17.
- Radianto, Elia. (1997). "Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II : Suatu Studi di Maluku". *Prisma*. No.3, 39-50
- Reksohadiprodjo, Sukanto. (2001). *Ekonomika Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta :BPFE.

Sumodiningrat, Gunawan. (1999). "Jaring Pengaman Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Vol.14.No.3, 1-16.

Tumilar, Richaed L.H. (1997). Otonomi Keuangan dan Ekonomi Daerah Tingkat II di Propinsi Sulut. *Tesis S-2*. Program Pasca Sarjana UGM.

Widodo, Susanto. (2001). Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Pekalongan. *Tesis S-2*. Program Pasca Sarjana UGM.

Yusuf, Maulana. 1999). "Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Sebagai Salah Satu Alat Analisis Alternatif Dalam Perencanaan Wilayah dan Kota". *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*. Vol.XLVII. No.2, 219-233.

_____. (2004). *Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Semarang: CV. Duta Nusindo.

_____. (2004). *Undang-Undang RI No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Semarang: CV. Duta Nusindo.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Dyah Permana Erawaty
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 4 Mei 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Katolik
Status : Belum Kawin
Tinggi/Berat Badan : 162 cm/50 kg
Warga Negara : Indonesia
Alamat Rumah : Wirobrajan, Werkudoro 11, Yogyakarta
Handphone : 081802670731
Email : seciliamanuel@yahoo.co.uk

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN FORMAL

2002 - 2006 : Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
1999 - 2002 : SMU Taruna Nusantara Magelang
1996 - 1999 : SMP Pius Pekalongan
1990 - 1996 : SD Pius Pekalongan
1989 - 1990 : TK Santo Yosep Pekalongan

PENDIDIKAN INFORMAL

- Kursus Bahasa Inggris di Impres Pekalongan Tahun 1994 - 1998
- Short Course Perpajakan, Brevet A & B Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Bulan Oktober 2005 - Januari 2006

- Kursus Bahasa Jerman di Pusat Bahasa Jerman Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2006.
- Kursus komputer program Microsoft Office di Ajendam Magelang tahun 2002.

LAIN · LAIN

- Menjadi panitia (Bendahara) dalam acara Pekan Keakraban Fakultas Ekonomi yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma Yogyakarta bulan Oktober 2004.
- Menjadi panitia (Wakil Ketua) dalam acara Pekan Keakraban Fakultas Ekonomi yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma Yogyakarta bulan September 2005.
- Menjadi peserta Accounting Quiz tingkat nasional di Universitas Surabaya bulan Juni 2005.
- Mengikuti seminar nasional *Fraud Audit* di Universitas Surabaya bulan Juni 2005.
- Mengikuti Kuliah Kerja Profesi selama 2 minggu di dusun Kreet Kabupaten Bantul Yogyakarta.
- Menjadi Asisten Dosen Praktikum pada September 2005 – Juni 2006.
- Menerima Beasiswa Sanata Dharma periode Juli – Desember 2005.
- Menjadi observer dalam Indonesia Varsities English Debate di Universitas Satya Wacana Salatiga bulan Januari 2004.
- Menjadi adjudicator dalam Java Overland English Debate di Sekolah Tinggi Teknik Telekomunikasi Bandung bulan Juni 2004.
- Menjadi Team Manager Sanata Dharma Team dalam Indonesia Varsities English Debate di Universitas Bina Nusantara Jakarta pada bulan Februari 2005.



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jalan Mataram No. 1 Telp. (0285) 423223 Pekalongan 51111

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : 070 / 25 / IV / 2006

- I. DASAR : Surat Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 15 Agustus 1972
Nomor : Bappemda/354/VIII/1972
- II. MENARIK : 1. Surat dari fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Nomor
31/Kaprodi Akt/041/II/2006 tanggal 24 Februari 2006.
2. Surat dari Kepala Kantor Kesbang Linmas Kota Pekalongan Nomor :
070/32/VI/2006 Tanggal 03 April 2006
- III. Yang bertandatangan di bawah ini Kepala BAPPEDA Kota Pekalongan bertindak atas nama
Walikota Pekalongan menyatakan **TIDAK KEBERATAN** atas pelaksanaan
RESEARCH/SURVEY di wilayah Kota Pekalongan yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : DYAH PERMANA ERAWATY
 2. Pekerjaan : Mahasiswi
 3. Alamat : Jl. Elak 64 BGI
 4. Penanggung jawab : Ir. Drs. Hansiadi YH, Msi Akt
 5. Maksud Tujuan : Untuk mengadakan penelitian dalam rangka pembuatan skripsi
dengan judul "Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dan
Pemanfaatan Potensi Daerah Sebagai Sektor Unggulan Selama
Pelaksanaan Otonomi Daerah"
 6. Lokasi : Kota Pekalongan
 7. Lamanya : 3 April 2006 s/d 3 Juli 2006

Dengan ketentuan sebagai berikut :

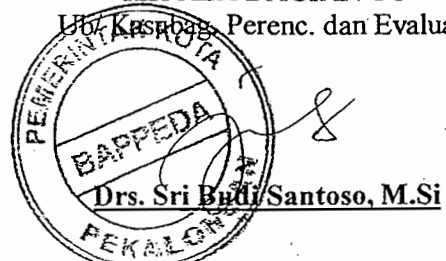
- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat
mengganggu kestabilan pemerintah ;
 - b. Sebelum research/survey, supaya lapor dahulu kepada pengawas wilayah/camat setempat;
 - c. Apabila masa berlakunya Surat Rekomendasi ini telah habis sedang pelaksanaannya belum
selesai, maka perpanjangan waktu harus diajukan kembali kepada Kepala BAPPEDA Kota
Pekalongan;
 - d. Setelah research / survey selesai, harus menyerahkan hasilnya kepada Kepala BAPPEDA
Kota Pekalongan.
- IV. Surat Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila pemegang
surat ini tidak menaati ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Dikeluarkan di : Pekalongan
Pada tanggal : 03 April 2006

TEMBUSAN Dikirim Kepada Yth :

1. Walikota Pekalongan, sebagai laporan;
2. Kakan Kesbang Linmas Kota Pekalongan;
3. Ka. Bardepus Kota Pekalongan;
4. Ka. Dipenda Kota Pekalongan;
5. Kabag. Keuangan Setda Kota Pekalongan;
6. Ka. BPS Kota Pekalongan;
7. Sdri. Dyah Permana E;
8. Arsip,.....

An. WALIKOTA PEKALONGAN
Kepala BAPPEDA
KEPALA BAGIAN TU
Bid. Kesbang, Perenc. dan Evaluasi





PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jl. Sumbing No. 1 Telp. 0285-381456, 381789 Fax. 381789
KAJEN - PEKALONGAN 51161

SURAT REKOMENDASI RESEARCH/SURVEY

Nomor : Bp. 072/ 42 /S/IV/2006

Dasar : Surat dari Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tanggal 24 Pebruari 2006 Nomor : 31/KaprodiAkt./042/Ii/2006 perihal permohonan Ijin penelitian/ Survey.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Pekalongan bertindak atas nama Bupati Pekalongan, menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan Research/Survey dalam wilayah Kabupaten Pekalongan yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : **DYAH PERMANA ERAWATY**
2. Pekerjaan : Mahasiswa
3. Alamat : Jl. Elok No. 64 Bina Griya Indah Pekalongan
4. Penanggungjawab : Ir.Drs. Hansiadi YH, M.Si, Akt.
5. Maksud Tujuan : Mengadakan penelitian untuk penyusunan skripsi dengan judul : "ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN PEMANFAATAN POTENSI DAERAH SEBAGAI SEKTOR UNGGULAN SELAMA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH".
6. Lokasi : Kabupaten Pekalongan
7. Peserta : 1 (satu) Orang

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Research/Survey tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan Research/Survey, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- c. Setelah Research/Survey selesai supaya langsung menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Kabupaten Pekalongan.

Surat Rekomendasi ini berlaku dari : 5 April s/d 30 Juni 2006

Dikeluarkan di : K a j e n
Pada Tanggal : 5 April 2006



An. BUPATI PEKALONGAN
Kepala Bappeda Kabupaten Pekalongan
Ub

Kabid Sos dan Pemerintahan



Drs. A. Apipudin, MSi.
NIP. 500 091 256

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dan Dim 0710 Pekalongan
2. Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kab. Pekalongan
3. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Pekalongan
4. Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Pekalongan
5.